

**EFEKTIVITAS KEBIJAKAN KEPALA DESA DALAM MENANGANI
KELANGKAAN PUPUK DI DESA PARARRA KECAMATAN
SABBANG KABUPATEN LUWU UTARA**

Skripsi

*Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana
Ekonomi (S.E) Pada Program Studi Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan
Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Palopo*



Oleh:

Ade

20 0401 0223

Pembimbing:

Akbar Sabani , S.Ei., M.E.

**PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO
2025**

**EFEKTIVITAS KEBIJAKAN KEPALA DESA DALAM MENANGANI
KELANGKAAN PUPUK DI DESA PARARRA KECAMATAN
SABBANG KABUPATEN LUWU UTARA**

Skripsi

*Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana
Ekonomi (S.E) Pada Program Studi Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan
Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Palopo*



Diajukan Oleh

Ade

20 0401 0223

Pembimbing:

Akbar Sabani , S.Ei., M.E.

**PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PALOPO
2025**

HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ade
NIM : 2004010223
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Program Studi : Ekonomi Syariah

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa:

1. Skripsi ini merupakan hasil karya sendiri, bukan plagiasi atau di publikasi dari tulisan/karya orang lain yang saya akui sebagai tulisan atau pikiran saya sendiri.
2. Seluruh bagian dari skripsi ini adalah karya saya sendiri selain kutipan yang ditujukan sumbernya. Segala kekeliruan yang ada didalamnya adalah tanggung jawab saya.

Bilamana dikemudian hari pernyataan ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi administrasi atas perbuatan saya dan gelar akademik yang saya peroleh karenanya dibatalkan.

Demikian surat pernyataan ini di buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Palopo, 15 April 2025

Yang membuat pernyataan,



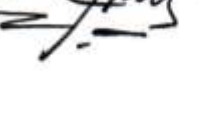
Ade
NIM: 2004010223

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi berjudul Efektivitas Kebijakan Kepala Desa dalam Menangani Kelangkaan Pupuk di Desa Pararra Kecamatan Sabbang Kabupaten Luwu Utara yang ditulis oleh Ade Nomor Induk Mahasiswa (NIM) 2004010223, mahasiswa Program Studi Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Palopo, yang telah dimunaqasyahkan pada hari Selasa, tanggal 19 Agustus 2025 Miladiyah bertepatan dengan 25 Shafar 1447 Hijriah, telah diperbaiki sesuai catatan dan permintaan Tim Penguji, dan diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (S.E.)

Palopo, 10 September 2025

TIM PENGUJI

- | | | |
|---|-------------------|---|
| 1. Dr. Hj. Anita Marwing, S.H.I., M.H.I. | Ketua Sidang | () |
| 2. Ilham, S.Ag., M.A | Sekretaris Sidang | () |
| 3. Dr. Muhammad Alwi, S.Sy., M.E.I. | Penguji I | () |
| 4. Dr. Agung Zulkarnain Alang, S.E., M.E.I. | Penguji II | () |
| 5. Akbar Sabani, S.E., M.E. | Pembimbing | () |

Mengetahui:

a.n. Rektor UIN Palopo
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam




Dr. Hj. Anita Marwing, S.H.I., M.H.I.
NIP. 198201242009012006

Ketua Program Studi
Ekonomi Syariah




Dr. Muhammad Alwi, S.Sy., M.E.I.
NIP. 198907152019081001

PRAKATA

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ
سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَاصْحَابِهِ (أما بعد)

Alhamdulillah, puji syukur senantiasa peneliti panjatkan kepada kehadiran

Allah Swt yang telah melimpahkan rahmat dan nikmat kepada semua hamba-Nya, terlebih kepada peneliti sehingga dapat menyelesaikan Skripsi dengan judul “Efektivitas Kebijakan Kepala Desa Dalam Menangani Kelangkaan Pupuk Pada desa Pararra Kabupaten Luwu Utara”. Setelah melalui proses dan perjuangan dengan waktu yang cukup lama.

Shalawat dan salam senantiasa haturkan kepada Nabi Muhammad Saw beserta para keluarga dan para sahabat-Nya. Skripsi disusun untuk memenuhi syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Universitas Agama Islam Negeri Palopo.

Penelitian ini peneliti peruntukan untuk kedua orang tua tercinta, (Bapak atas nama Masdim dan Ibu atas nama Wisra) yang telah memberikan Doa di setiap sudut tikarnya, tulus dan ikhlas memberikan cinta dan kasih sayang, perhatian, serta dukungan moral dan materi yang diberikan hingga saat ini. Terima kasih juga kepada diri sendiri yang sudah kuat dalam menyelesaikan skripsi sampai saat ini. Ucapan trimakasi dan penghargaan kepada:

1. Rektor Universitas Agama Islam Negeri Palopo, Dr. Abbas Langaji, M.Ag, Wakil Rektor Bidang Akademik dan Pengembangan kelembagaan, Dr. Munir Yusuf, M.Pd, Wakil Rektor Bidang Administrasi Umum Perencanaan dan Keuangan Dr. Masruddin, S.S., M.Hum dan Wakil Rektor Bidang

Kemahasiswaan dan Kerjasama Bapak Dr. Takdir Ishak, M.H.,M.Kes. yang telah memberikan kesempatan kepada penulis menuntut ilmu pengetahuan pada Institut Agama Islam Negeri Palopo.

2. Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Agama Islam Negeri Palopo, Dr. Hj Anita Marwing, S.HI.,M. HI. Wakil Dekan Bidang Akademik dan Pengembangan kelembagaan Ilham, S.Ag., M.A Wakil Dekan Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan, Dr. Alia Lestari, S.Si., M.Si. Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama Muhammad Ilyas, S.Ag., M.A. yang telah memberikan kesempatan kepada peneliti menuntut ilmu Pengetaahuan pada Fakultas Syariah.
3. Ketua Program Studi Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Agama Islam Negeri Palopo Muhammad Alwi, S.Sy., M.E.I. dan sekretaris program studi Ekonomi Syariah, Hardianti Yusuf, S.E.Sy., M.E. yang telah memberikan arahan dalam mengangkat judul skripsi ini.
4. Dosen Pembimbing Akbar Sabani, S.E.I., M.E. yang telah memberikan arahan untuk menyelesaikan Skripsi ini.
5. Dosen Penguji I, Muhammad Alwi,S.Sy., M.E.I dan Dosen Penguji II, Agung Zulkarnain, S.E.,M.E.I. yang telah banyak memberikan arahan untuk menyelesaikan skripsi ini.
6. Kepala Perpustakaan Universitas Islam Negeri Palopo Zainuddin S, S,E., M.Ak. beserta karyawan dan karyawan dalam ruang lingkup Universitas Islam Negeri Palopo, yang telah banyak membantu, khususnya dalam mengumpulkan literatur yang berkaitan dengan pembahasan skripsi ini.

7. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Luwu Utara beserta jajarannya. yang memberikan izin untuk melakukan penelitian.
8. Kepada aparat Desa Pararra dan para petani yang ada di Kabupaten Luwu Utara telah berkenaan memberikan informasi kepada peneliti untuk dijadikan dasar pertimbangan dalam penelitian.
9. Serta semua pihak yang terlibat dan membantu dalam pembuatan skripsi ini yang namanya tidak dapat saya sebutkan satu-persatu.

Penulis menyadari masih banyak kekurangan dalam penyusunan skripsi ini, untuk itu penulis mengharapkan saran dan masukan untuk perbaikan agar skripsi ini dapat selesai dengan maksimal. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat baik bagi penulis maupun para pembaca.

Palopo, 23 April 2025

Ade
NIM: 2004010223

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB DAN SINGKATAN

A. Transliterasi Arab-Latin

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat dilihat pada tabel berikut:

1. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	-	-
ب	Ba'	B	Be
ت	Ta'	T	Te
ث	Ṣa'	Ṣ	Es dengan titik di atas
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa'	Ḥ	Ha dengan titik di bawah
خ	Kha	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Ẓal	Ẓ	Zet dengan titik di atas
ر	Ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Esdan ye
ص	Ṣad	Ṣ	Es dengan titik di bawah
ض	Ḍaḍ	Ḍ	De dengan titik di bawah
ط	Ṭa	Ṭ	Te dengan titik di bawah
ظ	Ẓa	Ẓ	Zet dengan titik di bawah
ع	‘Ain	‘	Koma terbalik di atas

غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Fa
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha'	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya'	Y	Ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (').

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اَ	<i>fathah</i>	a	a
اِ	<i>kasrah</i>	i	i
اُ	<i>dammah</i>	u	u

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اِي	<i>fathah dan yā'</i>	ai	a dan i
او	<i>fathah dan wau</i>	au	a dan u

Contoh:

كَيْفَ : *kaifa*

هَوْلَ : *hau-la*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
ا... ا... ي	<i>fathah dan alif atau yā'</i>	ā	a dan garis di atas
ي	<i>kasrah dan yā'</i>	ī	i dan garis di atas
و	<i>ḍammah dan wau</i>	ū	u dan garis di atas

مَاتَ : *māta*

رَمَى : *rāmā*

قِيلَ : *qīla*

يَمُوتُ : *yamūtu*

4. Tā marbūtah

Transliterasi untuk *tā' marbūtah* ada dua, yaitu *tā' marbūtah* yang hidup atau mendapat harakat *fathah*, *kasrah* dan *ḍammah*, transliterasinya adalah [t].

sedangkan *tā' marbūtah* yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang berakhir dengan *tā' marbūtah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *tā' marbūtah* itu ditransliterasikan dengan ha (h). Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ	: <i>raudah al-atfāl</i>
الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ	: <i>al-madīnah al-fādilah</i>
الْحِكْمَةُ	: <i>al-hikmah</i>

5. Syaddah (*Tasydīd*)

Syaddah atau *tasydīd* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *tasydīd* (ّ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*.

Contoh:

رَبَّنَا	: <i>rabbānā</i>
نَجِّينَا	: <i>najjainā</i>
الْحَقُّ	: <i>al-haqq</i>
نُعَمِّ	: <i>nu'ima</i>
عَدُوُّ	: <i>'aduwwun</i>

Jika huruf ى ber-*tasydid* di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf *kasrah*((ِ), maka ia ditransliterasi seperti huruf *maddah* menjadi ī.

Contoh:

عَلِيٌّ : ‘Alī (bukan ‘Aliyy atau A’ly)
عَرَبِيٌّ : ‘Arabī (bukan A’rabiyy atau ‘Arabiy)

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf *ال* (*alif lam ma’rifah*). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa , al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf *syamsi yah* maupun huruf *qamariyah*. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

Contoh:

الشَّمْسُ : *al-syamsu* (bukan *asy-syamsu*)
الزَّلْزَلَةُ : *al-zalزالah* (bukan *az-zalزالah*)
الْفَلْسَفَةُ : *al-falsafah*
الْبِلَادُ : *al-bilādu*

7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (‘) hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif.

Contoh:

تَأْمُرُونَ	: <i>ta'murūna</i>
النَّوْءُ	: <i>al-nau'</i>
شَيْءٌ	: <i>syai'un</i>
أُمِرْتُ	: <i>umirtu</i>

8. Penulisan Kata Arab yang Lazim Digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa Indonesia, atau sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, atau lazim digunakan dalam dunia akademik tertentu, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya, kata al-Qur'an (dari *al-Qur'ān*), alhamdulillah, dan munaqasyah. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka harus ditransliterasi secara utuh. Contoh:

Syarh al-Arba'in al-Nawāwī

Risālah fī Ri'āyah al-Maslahah

9. Lafz al-Jalālah

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf jarr dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *mudāf ilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah.

Contoh:

دِينُ اللَّهِ	<i>Dīnullāh</i>	بِاللَّهِ	<i>billāh</i>
---------------	-----------------	-----------	---------------

Adapun *tā' marbūtah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafz al-jalālah*, diteransliterasi dengan huruf [t]. Contoh:

هُم فِي رَحْمَةِ اللَّهِ : *hum fī rahmatillāh*

10. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (*All Caps*), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (al-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR). Contoh:

Wa mā Muhammadun illā rasūl

Inna awwala baitin wudi'a linnāsi lallazī bi Bakkata mubārakan

Syahru Ramadān al-lazī unzila fīhi al-Qurān

Nasīr al-Dīn al-Tūsī

Nasr Hāmid Abū Zayd

*Al-Tūft**Al-Maslahah fī al-Tasyrī' al-Islāmī*

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata Ibnu (anak dari) dan Abū (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi.

Contoh:

Abū al-Walīd Muhammad ibn Rusyd, ditulis menjadi: Ibnu Rusyd, Abū al-Walīd Muhammad (bukan: Rusyd, Abū al-Walīd Muhammad Ibnu)

Nasr Hāmid Abū Zaīd, ditulis menjadi: Abū Zaīd, Nasr Hāmid (bukan, Zaīd Nasr Hāmid Abū)

B. Daftar Singkatan

Swt.	: <i>Subhanahu wa ta 'ala</i>
Saw.	: <i>Sallallahu 'alaihi wa sallam</i>
as	: <i>'alaihi al-salam</i>
H	: Hijrah
M	: Masehi
SM	: Sebelum Masehi
I	: Lahir Tahun (untuk orang yang masih hidup saja)
w	: Wafat tahun
QS .../...:27	: QS An – Naml / 27 : 17 atau An – Naml / 27 : 18
HR	: Hadis Riwayat
HET	: Harga Eceran Tertinggi
RTLH	: Rumah Tidak layak Huni
BUMDes	: Badan Usaha Milik Desa

C. Daftar Istilah

Efektivitas : Tingkat keberhasilan suatu kebijakan

Kebijakan : Keputusan pemerintah desa

Kepala Desa : Pemimpin desa

Kelangkaan Pupuk : Kekurangan pupuk di desa

Pupuk Bersubsidi : Pupuk yang mendapat subsidi pemerintah

Distribusi Pupuk : Penyaluran pupuk ke petani

Kelompok Tani : Organisasi petani desa

Kesejahteraan Petani : Tingkat kemakmuran petani

Subsidi Pupuk : Bantuan harga pupuk dari pemerintah

HET : Harga Eceran Tertinggi

Koordinasi : Kerjasama antar pihak

Sosialisasi : Penyampaian informasi kebijakan

Evaluasi : Penilaian hasil kebijakan

Aksesibilitas : Kemudahan memperoleh pupuk

Produktivitas : Hasil panen petani

DAFTAR ISI

HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	iv
PRAKATA	v
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB DAN SINGKATAN	viii
DAFTAR ISI	xviii
DAFTAR TABEL.....	xix
DAFTAR GAMBAR.....	xx
DAFTAR LAMPIRAN	xxi
ABSTRAK	ii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Batasan Masalah.....	5
C. Rumusan Masalah	5
D. Tujuan Penelitian	5
E. Manfaat Penelitian	6
BAB II KAJIAN TEORI	8
A. Penelitian Terdahulu Yang Relevan.....	8
B. Landasan Teori.....	13
C. Kerangka Pikir	23
BAB III METODE PENELITIAN	24
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian.....	24
B. Informan/Subjek Penelitian.....	24
C. Lokasi dan Waktu Penelitian	25
D. Sumber Data.....	25
E. Teknik Pengumpulan Data.....	26
F. Teknik Analisis Data.....	27
G. Definisi Istilah.....	28
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	29
A. Kondisi Secara Umum	29
B. Hasil Penelitian.....	44
C. Pembahasan Hasil Penelitian	67
BAB V PENUTUP	75
A. Kesimpulan	75
B. Saran.....	76
DAFTAR PUSTAKA.....	79
PEDOMAN WAWANCARA.....	81
LAMPIRAN	83

DAFTAR TABEL

Tabel 4.1 Batasan Desa Pararra	38
Tabel 4.2 Nama-Nama Dusun Dan Jumlah Rukun Tetangga	39
Tabel 4. 3 Jumlah Penduduk Desa Pararra Berdasarkan Jenis Kelamin Tahun 2021.....	40
Tabel 4. 4 Jumlah penduduk berdasarkan struktur usia tahun 2021	41
Tabel 4. 5 Penduduk Usia produktif berdasarkan pekerjaan.....	42
Tabel 4. 6 Perkembangan Penduduk Desa Pararra Menurut Pendidikan Terakhir Tahun 2021.....	43
Tabel 4. 7 Angka Putus Sekolah Tahun 2019-2021.....	43
Tabel 4. 8 Jumlah sekolah dan siswa menurut jenjang Pendidikan	44

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Kerangka Pikir.....	23
Gambar 2. Struktural Pemerintah Desa Pararra	37

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran Dokumentasi Proses Wawancara Dan Pengambilan Sampel Di Desa Pararra	83
--	----

ABSTRAK

Ade, 2025. *“Efektivitas Kebijakan Kepala Desa dalam Menangani Kelangkaan Pupuk di Desa Pararra Kecamatan Sabbang Kabupaten Luwu Utara”* Skripsi Program Studi Ekonomi Syariah, Fakultas Febi Insitut Agama Islam Negeri Palopo. Dibimbing oleh, Akbar Sabani

Skripsi ini membahas tentang Efektivitas kebijakan kepala desa dalam mengatasi kelangkaan pupuk di Desa Pararra, Kecamatan Sabbang, Kabupaten Luwu Utara, dibahas dalam tesis ini. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengevaluasi seberapa baik strategi kepala desa di Desa Pararra, Kabupaten Luwu Utara, dalam mengatasi masalah kelangkaan pupuk. Wawancara mendalam dengan petani dan perangkat desa digunakan untuk mengumpulkan data untuk jenis penelitian kualitatif ini dengan menggunakan teknik deskriptif kualitatif. Temuan penelitian menunjukkan bahwa, meskipun menghadapi sejumlah tantangan, termasuk keterlambatan distribusi dan kurangnya sosialisasi, program subsidi pupuk kepala desa telah berhasil membuat pupuk lebih mudah diakses oleh petani.. Pengaktifan kelompok tani sebagai perantara distribusi pupuk bersubsidi terbukti efektif dalam mendukung kebutuhan petani. Namun, tantangan dalam koordinasi antara pemerintah desa dan distributor masih perlu diatasi untuk memastikan ketersediaan pupuk yang optimal. Penelitian ini merekomendasikan perlunya evaluasi berkala dan penguatan kerjasama antara semua pihak terkait untuk meningkatkan efektivitas kebijakan dan kesejahteraan petani di Desa Pararra

Kata Kunci: Efektifitas Kebijakan, Kelangkaan Pupuk, Kesejahteraan Petani

ABSTRACT

Ade, 2025. *“Effectiveness of Village Head Policy in Supporting Fertilizer Scarcity in Pararra Village, North Luwu Regency”* Thesis of Islamic Economics Study Program, Febi, State Islamic Institute of Palopo
Supervised by, Akbar Sabani

This thesis discusses the effectiveness of village head policy in dealing with fertilizer scarcity in Pararra Village, Sabbang District, North Luwu Regency. This study aims to determine the effectiveness of village head policy in dealing with fertilizer scarcity in Pararra Village, North Luwu Regency. This type of research is qualitative research through a qualitative descriptive approach, data was collected through in-depth interviews with farmers and village officials. The results of the study indicate that the fertilizer subsidy policy implemented by the village head has succeeded in increasing fertilizer accessibility for farmers, although it still faces various obstacles such as late distribution and lack of socialization. Activation of farmer groups as intermediaries for the distribution of subsidized fertilizer has proven effective in supporting farmers' needs. However, challenges in coordination between the village government and distributors still need to be overcome to ensure optimal fertilizer availability. This study recommends the need for periodic evaluation and strengthening cooperation between all related parties to improve policy effectiveness and farmer welfare in Pararra Village

Keywords: Policy Effectiveness, Scarcity Fertilizer, Farmers' Welfare

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Salah satu sektor yang memegang peranan penting dalam pertumbuhan suatu negara adalah pertanian. Badan Pusat Statistik melaporkan bahwa sektor pertanian yang merupakan sektor industri pengolahan menyumbang 13,45% PDB Indonesia. Indonesia sebagai negara agraris menganggap pertanian sebagai salah satu sektor pertanian. Kemajuan dan perbaikan pertanian merupakan tujuan utama kebijakan pertanian Indonesia. Karena pertanian juga berkontribusi terhadap ketahanan pangan, maka pertanian harus menjadi prioritas. Pemerintah telah menerapkan kebijakan pangan melalui berbagai langkah, termasuk pengendalian harga, subsidi input produksi, dan peningkatan kelembagaan pangan. Kebijakan subsidi pupuk merupakan salah satu program subsidi input produksi tersebut.

Melalui sejumlah inisiatif, pemerintah Indonesia terus berupaya meningkatkan produktivitas dan hasil pertanian. Subsidi pupuk merupakan salah satu kebijakan strategis yang ditetapkan dengan tujuan agar pupuk lebih mudah diakses oleh petani dengan harga yang wajar.¹. Diharapkan subsidi ini dapat meningkatkan ketahanan pangan, meningkatkan hasil pertanian, dan meningkatkan kesejahteraan petani. Namun, penyaluran pupuk bersubsidi sering kali menemui sejumlah kendala dalam pelaksanaannya, antara lain terbatasnya

¹Ikmal Kholis and Khasan Setiaji, 'Efektivitas Kebijakan Subsidi Pupuk Pada Petani Padi', *Economic Education Analysis Journal*, 9.2 (2020), 503–15 <<https://doi.org/10.15294/eeaj.v9i2.39543>>.

pasokan, distribusi yang tidak tepat, dan disparitas harga yang melampaui harga eceran tertinggi (HET)².

Dengan mempermudah petani untuk menerima pupuk bersubsidi, pemerintah tengah menggalakkan kegiatan pertanian. Tujuan dari penyediaan pupuk bersubsidi yang lebih mudah adalah untuk memotivasi petani padi agar terus meningkatkan hasil panennya. Dengan menggalakkan penyediaan pupuk bersubsidi, pemerintah Indonesia yakin bahwa petani akan mampu berkembang dan mampu menafkahi keluarga, masyarakat, dan diri mereka sendiri di masa mendatang³.

Tujuan dari fasilitas tambahan untuk penyediaan pupuk adalah untuk membantu petani dalam menyediakan dan menggunakan pupuk untuk keperluan pertanian. Pendistribusian pupuk juga harus efisien dan efektif dalam hal kualitas, biaya, dan waktu. Pupuk harus disediakan agar petani dapat memanfaatkannya dengan segera, dengan cara yang berkualitas tinggi, dan—yang terpenting—agar barang-barang pertanian memberikan hasil yang berkualitas tinggi. Mengikuti spesifikasi lokasi yang disarankan dan kriteria teknis untuk penggunaan pupuk yang direkomendasikan, komposisi pupuk anorganik dan organik yang seimbang adalah yang menentukan seberapa efektif penggunaan pupuk. Pupuk pendukung didistribusikan ke seluruh wilayah Indonesia sesuai dengan Peraturan Pemerintah Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 04/Kpts/RC.210/B/02/2019 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Penyediaan dan Pendistribusian Pupuk Pendukung

² Ikmal Kholis, “ Analisis Efektivitas Kebijakan Subsidi Pupuk Pada Petani Padi”, *Jurnal Ekonomi Education*, Vol, 9 No. (2020)

³ Dyah May Karina, “Dampak Alih Fungsi Lahan Persawaaahan Terhadap Produksi Beras Dalam Rangka Ketahanan Pangan (Studi Kasus Di Kabupaten Tangerang), *Jurnal Ketahanan Nasional* Vo. 1 No. 2 (2020)

Tahun 2019. Mengingat pupuk sangat dibutuhkan dalam kegiatan pertanian dan sebagian besar petani Indonesia berpenghasilan rendah hingga menengah, maka sulit bagi mereka untuk membeli dan menyediakan pupuk karena harganya yang mahal⁴.

Desa Pararra, Kabupaten Luwu Utara merupakan salah satu daerah dengan potensi pertanian terbesar. Pertanian merupakan aspek vital bagi perekonomian desa karena sebagian besar penduduk desa menggantungkan hidup pada sektor pertanian. Namun, minimnya pupuk bersubsidi menjadi salah satu kendala terbesar yang dihadapi para petani Desa Pararra. Kondisi ini membahayakan ketahanan pangan dan kesejahteraan petani setempat, selain menghambat kegiatan pertanian.

Masalah kelangkaan pupuk tidak hanya menjadi tantangan teknis dalam dunia pertanian, tetapi juga merupakan bentuk kerusakan sistemik yang berdampak luas pada kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat, khususnya di pedesaan seperti Desa Pararra. Dalam konteks ini, penting untuk menyadari bahwa kerusakan terhadap lingkungan dan terganggunya proses produksi pangan merupakan bentuk ketidakadilan sosial yang tidak hanya merugikan petani, tetapi juga mengancam ketahanan pangan nasional.

Hal ini sejalan dengan peringatan dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 205 yang berbunyi:

الْفُسَادُ يُحِبُّ لَا وَاللَّهُ ۖ وَالنَّسْلُ الْخَرْتُ وَيُهْلِكُ فِيهَا لِيُفْسِدَ الْأَرْضَ فِي سَعَى تَوَلَّى وَإِذَا

⁴ Tutut Dwi Sutiknjo, “ Efektivitas Fasilitasi Penyediaan Pupuk Bersubsidi Kabupaten Manggarai Timur untuk Usahatani Padi Sawa, *Jurnal Ilmiah Nasional Mahasiswa Pertanian*, Vol.3 No 1 (2023)

"Dan apabila ia berpaling (dari kamu), ia berjalan di bumi untuk mengadakan kerusakan di sana dan merusak tanam-tanaman dan keturunan; dan Allah tidak menyukai kerusakan." (QS. Al-Baqarah: 205)

Ayat ini memberikan peringatan tegas bahwa segala bentuk tindakan yang menyebabkan kerusakan terhadap pertanian (al-harṣ) dan keturunan (an-nasl), termasuk kelangkaan sarana produksi pertanian seperti pupuk yang tidak ditangani secara adil dan efektif, merupakan bagian dari kerusakan (fasād) yang dibenci oleh Allah. Oleh karena itu, penanganan kelangkaan pupuk tidak hanya merupakan kewajiban administratif pemerintah desa, tetapi juga tanggung jawab moral dan spiritual dalam menjaga amanah bumi dan kesejahteraan masyarakat.

Berdasarkan observasi awal, salah satu kendala terbesar yang dihadapi petani di Desa Pararra dalam mempertahankan usaha taninya adalah minimnya pupuk. Minimnya pupuk bersubsidi menyebabkan sejumlah masalah, antara lain kualitas pertumbuhan tanaman yang buruk, hasil panen yang rendah, bahkan kemungkinan gagal panen yang dapat membahayakan ketahanan pangan masyarakat desa. Pemerintah desa harus mempertimbangkan kondisi ini dengan saksama karena berdampak pada menurunnya pendapatan petani. Agar petani di Desa Pararra dapat memenuhi kebutuhan nutrisi lahan pertaniannya, peran pemerintah dalam menjamin penyaluran pupuk bersubsidi yang tepat sasaran sangatlah penting.. Dengan demikian, produksi pertanian diharapkan dapat meningkat, mendukung ketahanan pangan, dan mendorong kesejahteraan masyarakat desa.

Dalam menangani masalah ini, kepala desa memegang peranan penting sebagai kepala pemerintahan daerah. Keberhasilan penanganan masalah kelangkaan pupuk sangat bergantung pada kebijakan dan tindakan terukur yang

dilakukan oleh kepala desa dalam mengawasi penyaluran pupuk bersubsidi. Oleh karena itu, diperlukan penelitian untuk mengkaji seberapa baik strategi kepala desa dalam menangani kelangkaan pupuk, khususnya di Desa Pararra.

B. Batasan Masalah

Penelitian ini dibatasi pada kebijakan yang diterapkan oleh kepala desa dalam menangani kelangkaan pupuk di Desa Pararra. Fokus penelitian meliputi efektivitas kebijakan tersebut serta faktor-faktor yang mendukung dan menghambat pelaksanaannya. Penelitian ini tidak membahas aspek teknis distribusi pupuk oleh pihak lain seperti distributor atau pemerintah kabupaten, melainkan hanya berfokus pada peran dan kebijakan kepala desa.

C. Rumusan Masalah

1. Bagaimana kebijakan yang diterapkan oleh kepala desa dalam menangani kelangkaan pupuk di Desa Pararra?
2. Apakah kebijakan kepala desa Pararra sudah efektif dalam menangani kelangkaan pupuk?
3. Apa saja faktor pendukung dan penghambat kepala desa dalam menangani kelangkaan pupuk di Desa Pararra?

D. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui kebijakan yang diterapkan oleh kepala desa dalam menangani kelangkaan pupuk di Desa Pararra.
2. Untuk mengetahui kebijakan kepala desa Pararra apakah sudah efektif dalam menangani kelangkaan pupuk.
3. Untuk mengetahui apa saja faktor pendukung dan penghambat kepala desa dalam menangani kelangkaan pupuk di Desa Pararra.

E. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan bagi pembaca mengenai dampak yang ditimbulkan akibat kelangkaan pupuk serta menjadi referensi bagi pihak yang akan melakukan penelitian ke depannya.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi petani

Petani dapat memproduksi pupuk organik secara mandiri dengan bahan-bahan yang ada di sekitar, seperti pupuk kandang, dedak, hingga sisa tanaman. Yang dimana pupuk organik ini dapat meningkatkan kesuburan tanah dan kualitas hasil panen.

b. Bagi pengusaha pupuk

Pengusaha pupuk dalam menangani kelangkaan pupuk meliputi diversifikasi produk, dan kerja sama dengan petani. Diversifikasi produk memungkinkan penawaran pupuk organik atau alternatif sebagai solusi, sementara inovasi teknologi bisa menghasilkan pupuk yang lebih efisien atau di produksi dengan cara baru. Peningkatan efisiensi distribusi memastikan pupuk tersedia di daerah membutuhkan, dan kerjasama dengan petani membantu memahami kebutuhan mereka dalam merancang solusi yang sesuai.

c. Bagi pemerintah desa

Pemerintah dapat menangani kelangkaan pupuk dengan Memfasiliasi pembuatan pupuk organik sendiri oleh petani, meningkatkan edukasi dan sosialisasi tentang penggunaan pupuk organik dan pupuk hayati serta

meningkatkan kerja sama dengan kelompok tani dan pihak terkait untuk mendapatkan bantuan pupuk subsidi atau pupuk alternatif.

d. Bagi peneliti

Mengembangkan solusi inovatif dan alternatif yang dapat meningkatkan produksi pertanian tanpa tergantung sepenuhnya pada pupuk kimia.

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Penelitian terdahulu yang relevan

1. Penelitian oleh Herminus Ajina dkk. (2023) dengan judul “Dampak Kelangkaan Pupuk Bersubsidi Terhadap Produksi dan Pendapatan Petani Padi Sawah di Desa Waimital, Kacamatan Kairatu, Kabupaten Seram Bagian Barat” . Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kuantitatif dengan analisis uji *paired sample test*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kelangkaan pupuk bersubsidi menyebabkan penurunan rata-rata produksi dari 1.567 kg menjadi 1.527 kg per musim tanam, dan meskipun tidak ada perbedaan signifikan pada pendapatan petani, mereka terpaksa membeli pupuk nonsubsidi dengan harga mahal. Persamaan penelitian ini dengan penelitian saya terletak pada fokusnya pada Kebijakan kepala desa dalam menangani kelangkaan pupuk dan juga dampaknya terhadap pertanian menggunakan pendekatan deskriptifnya. Perbedaannya, penelitian Herminus Ajina dkk. menggunakan analisis kuantitatif, sedangkan penelitian saya menggunakan analisis efektivitas kebijakan kepala desa di Desa Pararra, yang mengadopsi pendekatan kualitatif berbasis wawancara⁵.
2. Penelitian oleh M. Radinal Kautsar dkk. (2020) dengan judul "Analisis Kelangkaan Pupuk Bersubsidi dan Pengaruhnya terhadap Produktivitas

⁵Herminus Ajina, Natelda R Timisela, and Ester D Leatemia, ‘Dampak Kelangkaan Pupuk Bersubsidi Terhadap Produksi Dan Pendapatan Petani Padi Sawah Di Desa Waimital, Kecamatan Kairatu, Kabupaten Seram Bagian Barat’, *Jurnal Agrosilvopasture-Tech*, 2.2 (2023), 288–96 <<https://doi.org/10.30598/j.agrosilvopasture-tech.2023.2.2.288>>.

Padi di Kecamatan Montasik, Kabupaten Aceh Besar" Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dampak kelangkaan pupuk bersubsidi terhadap produktivitas padi serta faktor-faktor yang memengaruhi kelangkaan tersebut. Penelitian ini menggunakan metode kombinasi deskriptif kualitatif dan kuantitatif dengan analisis fungsi produksi Cobb-Douglass. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kelangkaan pupuk bersubsidi di Kecamatan Montasik disebabkan oleh tidak tepatnya dosis, jenis, dan waktu distribusi pupuk, serta realisasi pupuk yang lebih rendah dari usulan RDKK. Penggunaan pupuk jenis Urea dan NPK terbukti memiliki pengaruh signifikan terhadap produktivitas padi dengan persentase realisasi yang tinggi, sedangkan pupuk SP-36, ZA, dan organik tidak memiliki pengaruh signifikan. Persamaan penelitian ini dengan penelitian saya terletak pada fokusnya yang membahas kelangkaan pupuk bersubsidi dan dampaknya pada sektor pertanian. Selain itu, keduanya menggunakan pendekatan deskriptif untuk menganalisis faktor yang memengaruhi kelangkaan pupuk. Perbedaannya, penelitian oleh M. Radinal Kautsar dkk. menggunakan analisis kuantitatif dengan fungsi produksi Cobb-Douglass untuk mengukur pengaruh langsung kelangkaan pupuk terhadap produktivitas padi, sedangkan penelitian saya menggunakan pendekatan kualitatif berbasis wawancara untuk menganalisis efektivitas kebijakan kepala desa dalam menangani kelangkaan pupuk di Desa Pararra⁶

⁶ M. Radinal Kautsar, Sofyan, and T. Makmur, 'Analisis Kelangkaan Pupuk Bersubsidi Dan Pengaruhnya Terhadap Produktivitas Padi (*Oryza Sativa*) Di Kecamatan Montasik Kabupaten Aceh Besar', *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Pertanian*, 5.1 (2020), 97–107.

3. Penelitian oleh Tria Maulia dkk. (2023) dengan judul "Analisis Kelangkaan Pupuk Bersubsidi untuk Petani Padi (Studi Kasus Dusun VIII Desa Pematang Setrak Kecamatan Teluk Mengkudu)" bertujuan untuk mengetahui dampak kelangkaan pupuk bersubsidi terhadap produktivitas padi dan mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi kelangkaan tersebut. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan teknik pengumpulan data berupa wawancara, observasi, dan studi pustaka. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kelangkaan pupuk bersubsidi disebabkan oleh ketidaksesuaian antara permintaan/usulan pupuk dengan realisasi yang diberikan pemerintah, serta keterlambatan distribusi pupuk hingga ke tangan petani. Dampak kelangkaan ini membuat petani kesulitan mendapatkan pupuk bersubsidi tepat waktu, sehingga beralih ke pupuk nonsubsidi dengan harga lebih mahal, yang pada akhirnya mengurangi keuntungan usaha tani padi. Persamaan penelitian ini dengan penelitian saya terletak pada fokusnya dalam mengkaji permasalahan kelangkaan pupuk bersubsidi dan dampaknya pada sektor pertanian. Selain itu, keduanya menggunakan pendekatan deskriptif untuk menganalisis faktor-faktor yang memengaruhi kelangkaan pupuk. Perbedaannya, penelitian oleh Tria Maulia dkk. berfokus pada identifikasi penyebab dan dampak kelangkaan pupuk bersubsidi melalui analisis kualitatif umum di tingkat petani, sementara penelitian saya lebih spesifik dalam menganalisis efektivitas kebijakan kepala desa di Desa Pararra menggunakan pendekatan

wawancara untuk memahami solusi yang diambil dalam mengatasi kelangkaan pupuk.⁷

4. Penelitian oleh Dionisius Jusember Hardi dkk. (2023) dengan judul "Efektivitas Fasilitas Penyediaan Pupuk Bersubsidi Kabupaten Manggarai Timur untuk Usahatani Padi Sawah" Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan pengumpulan data melalui wawancara kepada 24 petani, 2 pemilik toko pertanian, dan pegawai Dinas Pertanian setempat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa efektivitas penyediaan pupuk bersubsidi diukur dari empat indikator: ketepatan harga, kuantitas, waktu ketersediaan, dan jenis pupuk. Keempat indikator ini menunjukkan bahwa penyediaan pupuk bersubsidi belum efektif, karena harga pupuk yang dijual kepada petani melebihi harga eceran tertinggi, adanya kelangkaan pupuk, dan jenis pupuk yang tidak sesuai dengan rekomendasi pemerintah. Persamaan penelitian ini dengan penelitian oleh Tria Maulia dkk. terletak pada fokusnya dalam mengkaji masalah kelangkaan pupuk bersubsidi dan dampaknya pada produktivitas pertanian. Namun, perbedaannya terletak pada aspek yang dikaji. Penelitian oleh Tria Maulia dkk. lebih berfokus pada dampak kelangkaan pupuk bersubsidi terhadap produktivitas padi dan identifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi kelangkaan tersebut, sedangkan penelitian saya lebih spesifik dalam menganalisis efektivitas kebijakan penyediaan pupuk bersubsidi dari pemerintah, serta kendala yang dihadapi petani dalam

⁷ Tria Maulia and others, 'Analisis Kelangkaan Pupuk Bersubsidi Untuk Petani Padi (Studi Kasus Dusun VIII Desa Pematang Setrak Kecamatan Teluk Mengkudu)', *JoulLaGe: Journal of Laguna Geography*, 2.1 (2023), 18.

mengakses pupuk tersebut. Selain itu, penelitian saya juga menekankan pada peran pemerintah dalam mendukung ketersediaan pupuk bersubsidi bagi petani padi di Desa Satar Padut⁸.

5. Penelitian oleh Wahyu Priandanata dkk. (2024) dengan judul "Efektivitas Implementasi Kebijakan Pengambilan Keputusan Kebijakan Subsidi Pupuk Di Desa Tumpakpelem Kecamatan Sawoo Kabupaten Ponorogo" bertujuan untuk mengevaluasi efektivitas kebijakan subsidi pupuk yang diterapkan di Desa Tumpakpelem. Penelitian ini menggunakan metode survei dengan pengumpulan data melalui wawancara langsung dengan petani untuk menggambarkan prosedur pelaksanaan program subsidi pupuk dan menilai dampaknya terhadap produktivitas pertanian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan subsidi pupuk yang diatur dalam Peraturan Menteri Pertanian Nomor 10 Tahun 2022 masih menghadapi berbagai kendala di lapangan. Ketidakpuasan petani terhadap kualitas dan ketersediaan pupuk bersubsidi menjadi masalah utama, yang memengaruhi hasil panen mereka. Banyak petani yang merasa kesulitan dalam mendapatkan pupuk tepat waktu, sehingga mereka terpaksa beralih ke pupuk nonsubsidi yang lebih mahal, yang pada akhirnya mengurangi keuntungan usaha tani mereka. Persamaan penelitian ini dengan penelitian oleh Tria Maulia dkk. terletak pada fokus keduanya dalam mengkaji dampak kelangkaan pupuk bersubsidi pada produktivitas pertanian. Keduanya juga menggunakan pendekatan

⁸ Dionisius Jusember Hardi, Tutut Dwi Sutiknjo, and Eko Yuliarsha Sidhi, 'Efektivitas Fasilitas Penyediaan Pupuk Bersubsidi Kabupaten Manggarai Timur Untuk Usahatani Padi Sawah', *JINTAN: Jurnal Ilmiah Pertanian Nasional*, 3.1 (2023), 1–12 <<https://doi.org/10.30737/jintan.v3i1.3973>>.

kualitatif untuk menganalisis faktor-faktor yang memengaruhi kelangkaan dan efektivitas kebijakan subsidi pupuk. Namun, perbedaan mendasar antara kedua penelitian ini adalah bahwa penelitian oleh Wahyu Priandanata dkk. lebih menekankan pada evaluasi kebijakan pemerintah dan prosedur distribusi pupuk bersubsidi, sementara penelitian oleh Tria Maulia dkk. berfokus pada identifikasi penyebab kelangkaan pupuk bersubsidi di tingkat petani. Dengan demikian, penelitian ini memberikan wawasan lebih mendalam tentang bagaimana kebijakan pemerintah dapat dioptimalkan untuk mendukung petani dan meningkatkan ketahanan pangan nasional. Melalui penelitian ini, penting untuk mengidentifikasi dan mengatasi masalah yang dihadapi dalam pelaksanaan kebijakan subsidi pupuk. Diperlukan revisi dan pengawasan yang lebih ketat untuk memastikan bahwa program subsidi pupuk dapat berjalan dengan efektif dan tepat sasaran, guna mendukung kesejahteraan petani dan produktivitas pertanian di Kabupaten Ponorogo.

B. Landasan Teori

1. Efektivitas

a. Pengertian Efektivitas

Efektivitas merupakan suatu ukuran yang menunjukkan seberapa jauh suatu tujuan dapat dicapai atau ditentukan. Menurut Sedarmayanti, efektivitas adalah tingkat keberhasilan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi secara optimal, tepat waktu, dan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Efektivitas mengacu pada hasil atau output yang dicapai dan menggambarkan kemampuan

organisasi atau individu dalam menyelesaikan pekerjaan secara benar dan berhasil guna.

Sementara itu, Ravianto dalam Masruri menjelaskan bahwa efektivitas menunjukkan seberapa besar tingkat kesesuaian antara output yang dihasilkan dengan tujuan yang ingin dicapai. Dengan kata lain, efektivitas dapat dikatakan tinggi jika hasil kerja mendekati atau sesuai dengan target yang telah direncanakan. Dalam konteks ini, efektivitas menekankan pada pencapaian hasil akhir dan bukan sekadar proses yang dilakukan, sehingga lebih fokus pada pencapaian tujuan secara nyata.

Menurut Butsi, Soeidy, dan Hadi, efektivitas berkaitan erat dengan kemampuan suatu sistem atau individu dalam menggunakan sumber daya yang ada untuk menghasilkan hasil yang diharapkan. Efektivitas dapat dinilai dari seberapa besar kegiatan yang dilakukan mampu memenuhi harapan dan kebutuhan pihak yang berkepentingan. Dengan demikian, efektivitas tidak hanya menyangkut tercapainya tujuan, tetapi juga bagaimana cara pencapaian itu dilakukan secara efisien dan tepat sasaran.

b. Ukuran Efektivitas

Efektivitas suatu program dapat diketahui dengan menetapkan variabel-variabel tertentu sebagai alat ukur. Adapun variabel yang digunakan untuk mengukur efektivitas program meliputi:

1) Ketepatan Sasaran Program

Menilai sejauh mana program menyasar kelompok atau individu yang memang membutuhkan dan sesuai dengan tujuan awal.

2) Sosialisasi Program

Mengukur tingkat penyebarluasan informasi program kepada masyarakat serta pemahaman mereka terhadap isi dan manfaat program tersebut.

3) Tujuan Program

Mengevaluasi apakah tujuan yang ditetapkan di awal program dapat tercapai secara optimal.

4) Pemantauan (Monitoring)

Melihat sejauh mana proses pelaksanaan program dipantau secara berkala dan bagaimana tindak lanjut terhadap kendala yang dihadapi di lapangan.⁹

2. Kebijakan

Kebijakan (Policy) adalah suatu keputusan atau tindakan yang diambil oleh otoritas tertentu, seperti pemerintah, untuk mengatur, mengendalikan, atau mengarahkan suatu masalah publik atau sektor tertentu. Kebijakan bertujuan untuk menciptakan keteraturan, memberikan solusi terhadap persoalan masyarakat, serta menjadi pedoman dalam pelaksanaan program pembangunan. Dalam konteks tata kelola pemerintahan, kebijakan memainkan peran penting dalam menyusun langkah-langkah strategis untuk mencapai tujuan nasional atau lokal.

Kebijakan dapat diartikan sebagai serangkaian keputusan atau pilihan yang saling berkaitan dan diambil oleh aktor-aktor yang berwenang dalam rangka

⁹ Akbar Sabani and others, 'JCH (Jurnal Cendekia Hukum) SHARI'A COMPLIANCE PRINCIPLES IN FINANCIAL TECHNOLOGY', *JCH (Jurnal Cendekia Hukum)*, 8.September (2022), 47–59 <<https://doi.org/10.3376/jch.v8i1.542>>.

mencapai tujuan tertentu. Kebijakan tidak selalu berbentuk tertulis, tetapi bisa berupa praktik-praktik yang diterima secara luas dalam pelaksanaan pemerintahan. Selain itu, kebijakan juga harus mempertimbangkan berbagai aspek, seperti kondisi sosial, ekonomi, budaya, dan lingkungan agar implementasinya dapat berjalan efektif dan diterima oleh masyarakat luas.

Menurut Muhammad Nur Khaliq, teori kebijakan publik menekankan bahwa kebijakan adalah proses yang kompleks yang melibatkan identifikasi masalah, perumusan alternatif solusi, pengambilan keputusan, pelaksanaan, serta evaluasi hasil. Ia juga menjelaskan bahwa kebijakan tidak hanya ditentukan oleh rasionalitas teknokratis, tetapi juga oleh dinamika politik, kekuatan sosial, dan kepentingan kelompok tertentu. Oleh karena itu, proses penyusunan kebijakan harus partisipatif dan berdasarkan data yang valid agar sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Dalam kerangka ini, kebijakan publik, termasuk kebijakan pertanian seperti subsidi pupuk, harus dilihat sebagai instrumen negara untuk mendorong kesejahteraan petani dan menjamin ketahanan pangan. Kebijakan tidak hanya dilihat dari sisi peraturan, tetapi juga mencakup proses pelaksanaannya di lapangan, efektivitas distribusi, serta keberpihakan pada kelompok yang membutuhkan. Hal ini menekankan pentingnya evaluasi berkala terhadap kebijakan agar tetap relevan dan responsif terhadap perubahan kondisi sosial-ekonomi masyarakat.

Kebijakan subsidi pupuk dinilai sebagai salah satu upaya intervensi pemerintah untuk membantu meringankan beban biaya produksi petani. Subsidi

ini bertujuan untuk menjaga stabilitas harga pupuk, meningkatkan produktivitas pertanian, dan mendorong swasembada pangan. Namun, efektivitasnya sering kali dipengaruhi oleh tantangan di lapangan, seperti distribusi yang tidak merata, penyaluran yang tidak tepat sasaran, serta lemahnya pengawasan. Oleh karena itu, perbaikan dalam mekanisme penyaluran dan keterlibatan aktif masyarakat dalam pengawasan menjadi kunci keberhasilan kebijakan ini.¹⁰

3. Kelangkaan

a. Pengertian Kelangkaan

Kelangkaan adalah suatu kondisi di mana kebutuhan manusia yang tidak terbatas harus dihadapkan dengan sumber daya yang jumlahnya terbatas. Dalam ilmu ekonomi, kelangkaan merupakan inti dari semua permasalahan ekonomi karena manusia harus membuat pilihan dalam menggunakan sumber daya yang terbatas untuk memenuhi kebutuhannya. Kelangkaan terjadi karena ketidakseimbangan antara permintaan dan ketersediaan barang atau jasa.

Secara umum, kelangkaan dapat dibedakan menjadi dua, yaitu kelangkaan alami dan kelangkaan buatan. Kelangkaan alami terjadi karena keterbatasan sumber daya alam, seperti lahan, air, atau bahan tambang. Sementara itu, kelangkaan buatan terjadi akibat ulah manusia, misalnya karena penimbunan barang, distribusi yang tidak merata, atau kebijakan yang tidak tepat. Kedua jenis kelangkaan ini sama-sama berdampak pada kehidupan ekonomi masyarakat.

¹⁰ Akbar Sabani, 'Portrait Implementation Muzara'ah Contract Effort Encourage Improvement Community's Economy (Study on Shallot Farmers Anggeraja District, Enrekang Regency)', *Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia*, 1.1 (2023), 2503–1872.

Dalam perspektif ekonomi, kelangkaan menuntut adanya pengelolaan sumber daya secara efisien dan bijak. Karena barang dan jasa tidak tersedia dalam jumlah yang cukup untuk semua orang, maka harus ada prioritas dalam penggunaannya. Di sinilah pentingnya konsep pilihan dan biaya peluang (opportunity cost), yaitu memilih satu hal berarti harus mengorbankan hal lainnya. Oleh karena itu, pemerintah dan individu harus mampu membuat keputusan yang rasional dalam menghadapi kelangkaan.

Kelangkaan juga dapat menimbulkan berbagai dampak, seperti kenaikan harga barang, krisis sosial, hingga konflik antarkelompok masyarakat. Contohnya, ketika terjadi kelangkaan bahan bakar atau pupuk, maka akan memengaruhi sektor-sektor lain seperti pertanian, transportasi, dan industri, yang pada akhirnya berpengaruh terhadap kestabilan ekonomi nasional. Oleh sebab itu, upaya pencegahan dan pengelolaan kelangkaan sangat penting agar tidak menimbulkan gejolak sosial yang lebih luas.

Mengatasi kelangkaan memerlukan kebijakan yang tepat, baik dari sisi produksi, distribusi, maupun konsumsi. Pemerintah perlu memastikan pasokan barang-barang pokok tetap stabil dan merata, serta mendorong masyarakat untuk menggunakan sumber daya secara hemat dan berkelanjutan. Di sisi lain, masyarakat juga harus meningkatkan kesadaran akan pentingnya menjaga keseimbangan antara kebutuhan dan ketersediaan sumber daya, agar tidak mengalami kelangkaan yang berkepanjangan di masa depan.

b. Faktor Yang Penyebab Kelangkaan

Kelangkaan terjadi karena kebutuhan manusia yang tidak terbatas, sedangkan sumber daya untuk memenuhi kebutuhan tersebut terbatas. Berikut ini beberapa faktor utama yang menyebabkan kelangkaan:

1) Pertumbuhan Penduduk

Pertambahan jumlah penduduk yang pesat akan meningkatkan kebutuhan terhadap barang dan jasa, seperti pangan, air bersih, tempat tinggal, dan energi. Jika peningkatan kebutuhan ini tidak diimbangi dengan peningkatan produksi, maka akan terjadi kelangkaan.

2) Kemampuan Produksi yang Terbatas

Kemampuan produksi suatu negara dipengaruhi oleh ketersediaan sumber daya alam, tenaga kerja, modal, dan teknologi. Jika salah satu faktor produksi terbatas, maka jumlah barang atau jasa yang dihasilkan juga akan terbatas, menyebabkan kelangkaan di pasar.

3) Perbedaan Letak Geografis

Tidak semua wilayah memiliki sumber daya alam yang sama. Beberapa daerah mungkin kaya akan tambang tetapi miskin air, atau subur untuk pertanian tetapi jauh dari pusat distribusi. Perbedaan ini menyebabkan ketimpangan distribusi barang dan menciptakan kelangkaan di wilayah tertentu.

4) Bencana Alam

Bencana seperti gempa bumi, banjir, kekeringan, atau letusan gunung berapi dapat merusak infrastruktur dan lahan produksi. Akibatnya, proses

produksi dan distribusi terganggu, sehingga menyebabkan pasokan barang menjadi langka.

5) **Pandemi**

Pandemi seperti COVID-19 berdampak besar pada kelangkaan karena mengganggu rantai pasok global, menurunkan produksi, serta membatasi pergerakan barang dan orang. Akibatnya, banyak barang kebutuhan pokok maupun jasa menjadi sulit diperoleh.

c. **Jenis-jenis Kelangkaan**

Kelangkaan tidak hanya terjadi pada barang kebutuhan sehari-hari, tetapi juga pada berbagai jenis sumber daya yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan manusia. Adapun jenis-jenis kelangkaan antara lain:

1) Kelangkaan Sumber Daya Alam

Kelangkaan ini terjadi ketika sumber daya alam seperti air, tanah subur, hasil tambang, dan energi fosil tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan manusia. Hal ini dapat disebabkan oleh eksploitasi berlebihan, kerusakan lingkungan, atau keterbatasan lokasi geografis. Contohnya adalah kelangkaan air bersih di daerah kering atau habisnya cadangan minyak bumi.

2) Kelangkaan Sumber Daya Manusia

Kelangkaan ini terjadi ketika jumlah atau kualitas tenaga kerja tidak memadai. Misalnya, kurangnya tenaga ahli atau profesional di bidang tertentu seperti dokter spesialis atau teknisi industri. Kelangkaan ini juga

bisa terjadi akibat rendahnya tingkat pendidikan atau keterampilan yang tidak sesuai dengan kebutuhan pasar kerja.

3) Kelangkaan Sumber Daya Modal

Modal merupakan alat bantu produksi seperti mesin, bangunan, alat transportasi, dan uang. Kelangkaan terjadi jika ketersediaan alat produksi ini tidak mencukupi untuk menjalankan kegiatan ekonomi secara maksimal. Misalnya, industri kecil yang kesulitan berkembang karena kekurangan mesin atau modal usaha.

4) Kelangkaan Sumber Daya Kewirausahaan

Sumber daya ini merujuk pada kemampuan untuk mengelola dan mengombinasikan faktor-faktor produksi (alam, tenaga kerja, dan modal) secara efektif dan efisien. Kelangkaan terjadi jika hanya sedikit individu yang memiliki kemampuan inovatif, berani mengambil risiko, dan berpikir kreatif dalam menciptakan lapangan kerja dan produk baru.

d. Dampak Kelangkaan

Kelangkaan sumber daya atau barang kebutuhan tidak hanya mengganggu aktivitas ekonomi, tetapi juga dapat menimbulkan berbagai masalah sosial.

Dampak-dampak tersebut antara lain:

1) Kenaikan Harga

Ketika barang atau jasa menjadi langka, sementara permintaan tetap tinggi, maka harga akan mengalami kenaikan. Hal ini dikenal sebagai hukum permintaan dan penawaran. Contohnya, saat bahan bakar langka, harga BBM

bisa melonjak drastis, yang kemudian berdampak pada harga barang-barang lain.

2) Pengangguran Meningkat

Kelangkaan sumber daya, khususnya modal dan bahan baku, bisa menyebabkan perusahaan mengurangi produksi atau bahkan gulung tikar. Akibatnya, banyak pekerja kehilangan pekerjaan, sehingga tingkat pengangguran meningkat.

3) Kriminalitas Meningkat

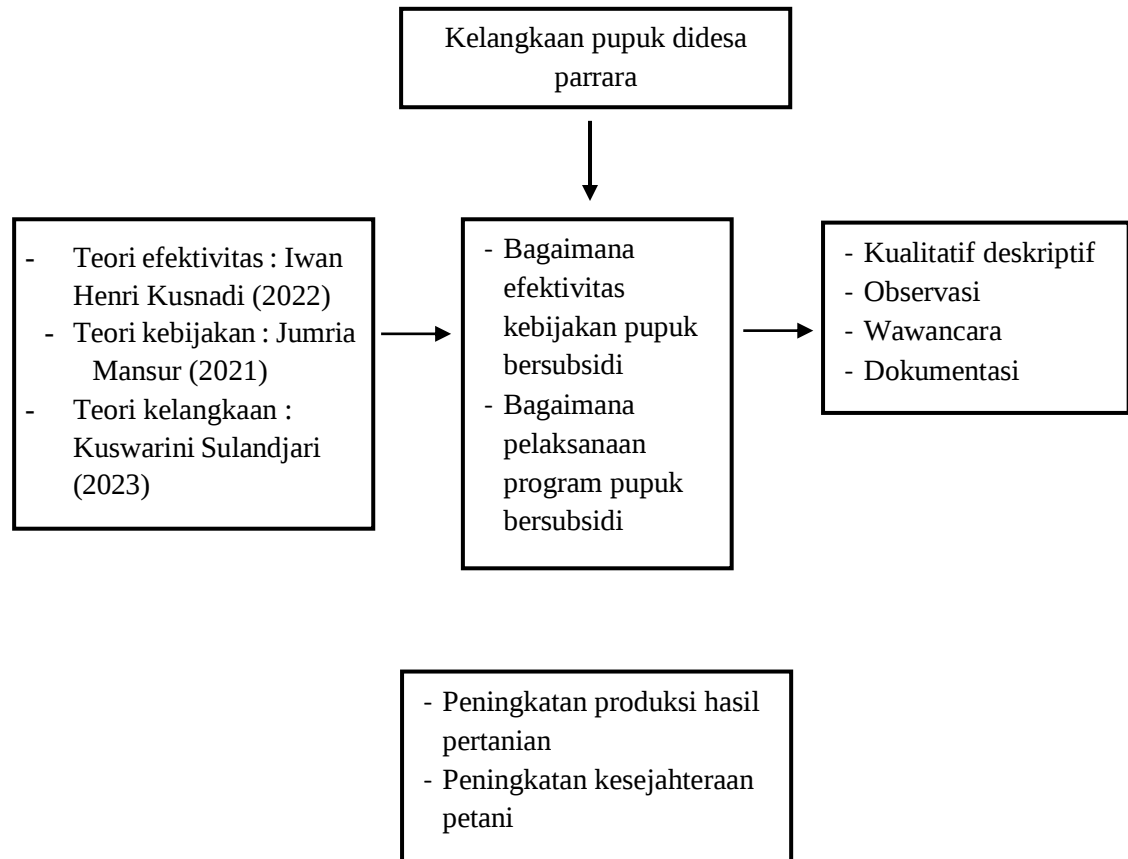
Ketika masyarakat sulit memenuhi kebutuhan dasar akibat kelangkaan, sebagian orang mungkin terdorong melakukan tindakan kriminal seperti pencurian, perampokan, atau penipuan demi bertahan hidup. Kondisi ekonomi yang sulit sering kali menjadi pemicu tingginya angka kriminalitas.

4) Angka Kemiskinan Bertambah

Kelangkaan yang berkepanjangan dapat menurunkan daya beli masyarakat, terutama golongan menengah ke bawah. Biaya hidup menjadi tinggi sementara pendapatan tetap atau bahkan menurun. Akibatnya, jumlah penduduk miskin akan terus bertambah.

C. Kerangka Pikir

Gambar 1. Kerangka Pikir



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan deskriptif kualitatif. Pendekatan ini bertujuan untuk menggambarkan dan memahami fenomena yang terjadi secara mendalam berdasarkan fakta dan data yang dikumpulkan dari lapangan, bukan melalui angka-angka statistik.

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif, dengan alasan bahwa penelitian ini berfokus pada pemahaman makna, pandangan, serta pengalaman subjek penelitian. Melalui metode ini, peneliti dapat mengeksplorasi lebih dalam konteks sosial dan perilaku yang diamati, sehingga hasil penelitian lebih kaya dan mendalam.

B. Informan/Subjek Penelitian

Penelitian ini akan melibatkan beberapa informan yang dianggap relevan untuk memperoleh data yang akurat mengenai efektivitas kebijakan kepala desa dalam menangani kelangkaan pupuk di Desa Pararra. Informan yang akan dijadikan subjek penelitian terdiri dari:

1. Petani Lokal
 - a. Jumlah: 5 petani
 - b. Kriteria: Petani yang aktif dalam kegiatan pertanian, khususnya padi, dan telah mengalami langsung kelangkaan pupuk bersubsidi. Mereka akan diminta untuk memberikan informasi mengenai pengalaman mereka terkait distribusi dan aksesibilitas pupuk.

2. Perangkat Desa

- a. Jumlah: 3 orang (Kepala Desa, Penyuluh Pertanian, dan Kepala Bidang Pertanian)
- b. Kriteria: Perangkat yang terlibat langsung dalam pengambilan keputusan dan implementasi kebijakan terkait distribusi pupuk. Mereka akan memberikan wawasan mengenai kebijakan yang diterapkan serta tantangan yang dihadapi dalam pelaksanaannya.

C. Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Desa Pararra, Kecamatan Sabbang, Kabupaten Luwu Utara. Pemilihan lokasi ini didasarkan pada pertimbangan bahwa desa tersebut relevan dengan permasalahan yang diteliti dan memiliki kondisi sosial yang sesuai dengan fokus penelitian. Adapun waktu pelaksanaan penelitian berlangsung mulai dari bulan Mei hingga Juli 2025, yang mencakup tahap persiapan, pengumpulan data, analisis data, hingga penyusunan laporan akhir penelitian.

D. Sumber Data

1. Data Primer

Data primer merupakan data utama yang diperoleh langsung dari lapangan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Sumber utama data ini adalah informan dari kalangan petani yang ada di Desa Pararra serta perangkat desa Pararra yang dianggap mengetahui secara langsung kondisi yang diteliti.

2. Data sekunder

Data sekunder adalah data pendukung yang diperoleh dari berbagai

dokumen tertulis, laporan desa, buku, artikel, serta data statistik dari instansi terkait yang berkaitan dengan topik penelitian. Data ini digunakan untuk melengkapi dan memperkuat temuan dari data primer.

E. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan beberapa teknik pengumpulan data untuk memperoleh informasi yang lengkap dan mendalam, yaitu:

1. Observasi

Observasi dilakukan dengan mengamati langsung kondisi lapangan, aktivitas petani, serta situasi sosial di Desa Pararra. Teknik ini bertujuan untuk mendapatkan data faktual mengenai perilaku, kebiasaan, serta keadaan lingkungan yang tidak bisa sepenuhnya dijelaskan melalui wawancara saja.

2. Wawancara

Teknik ini dilakukan dengan cara berdialog langsung bersama informan, seperti para petani dan perangkat Desa Pararra. Wawancara dilakukan secara semi-terstruktur agar peneliti dapat menggali informasi secara fleksibel sesuai dengan topik yang diteliti.

3. Dokumentasi

Teknik dokumentasi digunakan untuk mengumpulkan data tertulis maupun visual seperti foto kegiatan, arsip desa, laporan pertanian, dan dokumen lain yang mendukung. Dokumentasi ini berguna sebagai bukti pendukung dari data yang diperoleh melalui wawancara dan observasi.

F. Teknik Analisis Data

Dalam penelitian kualitatif ini, teknik analisis data dilakukan secara sistematis dengan mengikuti tiga tahapan utama menurut Miles dan Huberman, yaitu:

1. Reduksi Data

Reduksi data adalah proses penyederhanaan dan pemilahan data mentah yang diperoleh dari lapangan. Data yang tidak relevan disisihkan, sementara data yang penting dicatat dan diklasifikasikan sesuai dengan fokus penelitian. Tujuannya adalah untuk mempermudah peneliti dalam memahami inti dari informasi yang diperoleh.

2. Penyajian Data

Setelah data direduksi, langkah selanjutnya adalah menyajikan data dalam bentuk narasi, tabel, atau matriks yang memudahkan peneliti dalam melihat pola atau hubungan antar informasi. Penyajian ini bertujuan untuk membantu peneliti dalam menganalisis dan menafsirkan data secara logis dan sistematis.

3. Penarikan Kesimpulan

Tahap akhir dari analisis data adalah penarikan kesimpulan berdasarkan temuan-temuan yang telah disusun sebelumnya. Kesimpulan ini bersifat sementara dan dapat berubah jika ditemukan data baru, tetapi kemudian menjadi lebih kuat dan valid setelah proses verifikasi dan pembahasan dilakukan secara mendalam.

.

G. Definisi Istilah

Untuk memudahkan pemahaman dalam penelitian ini, berikut dijelaskan beberapa istilah kunci yang digunakan:

1. Efektivitas

Efektivitas adalah tingkat keberhasilan suatu kegiatan atau program dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Suatu program dikatakan efektif apabila hasil yang dicapai sesuai atau bahkan melebihi target yang direncanakan, baik dalam hal kualitas, kuantitas, maupun waktu pelaksanaan.

2. Kebijakan

Kebijakan adalah serangkaian keputusan atau aturan yang dibuat oleh pihak berwenang (seperti pemerintah) yang bertujuan untuk mengatur dan mengarahkan tindakan atau kegiatan tertentu. Dalam konteks penelitian ini, kebijakan merujuk pada langkah-langkah atau program yang dibuat pemerintah dalam mengatur distribusi dan penggunaan pupuk.

3. Kelangkaan Pupuk

Kelangkaan pupuk adalah kondisi di mana jumlah pupuk yang tersedia di pasar tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan petani dalam kegiatan pertaniannya. Hal ini dapat disebabkan oleh gangguan distribusi, keterbatasan produksi, atau ketidaktepatan sasaran dalam penyaluran pupuk subsidi.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Kondisi Secara Umum

1. Kondisi Geografis

Desa Pararra merupakan salah satu desa yang terletak di Kecamatan Sabbang, Kabupaten Luwu Utara, dengan luas wilayah mencapai 9.996,9 hektare. Desa ini dihuni oleh 1.247 jiwa yang terbagi ke dalam 362 kepala keluarga dengan total anggota keluarga sebanyak 885 jiwa. Secara geografis, desa ini memiliki kondisi wilayah yang cukup luas dan terdiri dari beberapa dusun. Keberadaan lahan yang luas menjadikan Desa Pararra memiliki potensi dalam bidang pertanian dan perkebunan, yang menjadi mata pencaharian utama masyarakatnya.

Dalam hal sarana dan prasarana, Desa Pararra memiliki infrastruktur dasar yang cukup memadai. Tersedia fasilitas keagamaan berupa masjid di setiap dusun yang berfungsi sebagai tempat ibadah sekaligus pusat kegiatan sosial masyarakat. Di bidang pendidikan, terdapat dua sekolah dasar yakni SDN 022 Pararra dan SDN 024 Lena yang menjadi tempat belajar anak-anak usia sekolah dasar di desa tersebut. Selain itu, terdapat pula fasilitas kesehatan berupa posyandu yang berperan penting dalam pelayanan kesehatan dasar, khususnya bagi ibu hamil, balita, dan lansia..¹¹

¹¹Ari.S, *“Pemberdayaan Masyarakat Melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) di Desa Pararra Kecamatan Sabbang Kabupaten Luwu Utara”*. UIN Palopo. 2022: 33

2. Visi Misi Desa Parrara

a. Visi

Bersama melanjutkan pembangunan menuju desa pararra yang lebih baik.

b. Misi

Untuk mencapai visi tersebut, Desa Pararra menetapkan beberapa misi sebagai berikut:

1. Meningkatkan kualitas pelayanan publik yang cepat, tepat, dan transparan.
2. Mendorong pembangunan infrastruktur desa secara merata dan berkelanjutan.
3. Memajukan sektor pertanian dan usaha masyarakat guna meningkatkan perekonomian desa.
4. Mengembangkan sumber daya manusia melalui pendidikan, pelatihan, dan pembinaan masyarakat.
5. Menjaga keharmonisan sosial serta meningkatkan kegiatan keagamaan dan budaya lokal.

Keterkaitan visi/misi RPJMD 2021-2026 Dengan RPJMDes 2021-2027

No	Visi RPJMD 2021 - 2026	Visi RPJMDes 2021 - 2027
	Luwu Utara Maju, Mandiri dan Harmonis	Bersama melanjutkan pembangunan menuju Desa Parrara yang lebih baik
No	Misi RPJMD 2021 - 2027	Misi RPJMDes 2021 – 2027
	1. Memperkuat data kelola pemerintah yang efektif professional dan akuntabel	1. Meningkatkan kinerja dan pelayanan aparat desa yang profesional, berkualitas, transparan dan akuntabel
	2. memperkuat konektifitas infrastrustur maju dan mandiri	2. Meningkatkan pembanngunan infrastruktur dengan semangat gotong royong untuk pencapaian kualitas pembangunan yang lebih baik
	3.Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup dan ketahanan bencana	3. Meningkatkan mutu layanan kesehatan dan mensukseskan program penanganan pandemi covid-19, penanganan stunting, sanitasi lingkungan serta melanjutkan program bedah rumah/rehab rumah tidak layak huni (RTLH)
	4. Menigkatkan ketahanan sosial budaya berbasis kearifan lokal	4. Meningkatkan mutu Pendidikan, Keagamaan,organisasi Kepemudaan, Kamtibmas dan sosial budaya berbasis kearifan lokal
	5. Mewujudkan pelayanan dasar yang berkeadilan sosial, ekonomi	5. Mewujudkan sistem usaha mandiri melalui program

Sumber : profil desa

3. Sejarah Desa Pararra

Desa Pararra adalah salah satu desa tertua yang ada di Kecamatan Sabbang.

Konon, keberadaan desa ini sudah ada bahkan sebelum Indonesia merdeka tahun

1945. Setelah masa perjuangan rakyat Luwu dan para pemuda melawan tentara Belanda (NICA) sekitar tahun 1948–1949, dan dilanjutkan dengan pemberontakan DI/TII yang dipimpin Kahar Muzakkar pada tahun 1953–1965, sistem pemerintahan di Desa Pararra pun ikut berubah. Awalnya desa ini dipimpin oleh tokoh adat yang disebut Tomakaka, namun setelah itu beralih ke sistem pemerintahan yang dipimpin oleh seorang kepala desa.

Pemerintahan Desa Pararra secara resmi dimulai tahun 1965 dan terus berlanjut hingga sekarang. Kepala desa pertama adalah Abu Dg. Mawakka yang memimpin sejak 1945 sampai 1965. Setelah itu, kepemimpinan berganti ke Tema To Mahara dari 1965 sampai 1982. Kepala desa ketiga adalah Mangun Pakan (1982–1993), lalu Bachrun Zaur. S menjabat tahun 1993–1994. Selanjutnya, Idrus To Pacawang menjadi kepala desa dari 1994–2000, lalu digantikan oleh Basri Abdillah yang menjabat cukup lama, dari tahun 2001–2014. Setelah itu, Nirwan L menjadi kepala desa mulai 2014–2021 dan kembali terpilih untuk periode 2021–2027.

Dulu, tepatnya tahun 1953, Desa Pararra sempat dimekarkan menjadi dua, yaitu Desa Pararra yang dipimpin Abu Dg. Mawakka, dan Desa Tandung yang dipimpin oleh Maddi Aja To Kurniati. Kemudian pada tahun 1994, Desa Pararra kembali dimekarkan menjadi Desa Pararra dan Desa Tulak Tallu.

Sepanjang sejarahnya, beberapa peristiwa penting terjadi di Desa Pararra. Misalnya, pada tahun 1965 sampai 1980, warga merasakan hidup yang damai karena pemerintah desa bekerja sama dengan lembaga adat. Tahun 1984, dikenal dengan masa "lappo ase" atau panen padi yang melimpah. Namun di tahun 1986,

banjir besar melanda dan menenggelamkan banyak rumah. Tahun 1989, masyarakat menikmati hasil panen kakao yang sangat baik. Lalu di tahun 1998, terjadi banjir besar lagi yang menghanyutkan rumah penduduk dan merusak jalan penghubung desa ke pusat kecamatan, bahkan memutus jalur antara Kecamatan Sabbang dan Limbong.

4. Pembagian Tugas Dari Pemerintah Desa

Pemerintahan Desa Pararra dijalankan oleh kepala desa bersama perangkat desa lainnya. Masing-masing memiliki peran dan tanggung jawab yang berbeda, namun saling berkaitan dan bekerja sama demi kelancaran penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, serta pelayanan kepada masyarakat. Berikut ini adalah rincian tugas dari masing-masing unsur dalam struktur pemerintahan desa:

a. Kepala Desa

Kepala desa adalah pemimpin tertinggi dalam struktur pemerintahan desa. Ia memiliki wewenang untuk menyusun kebijakan, memimpin penyelenggaraan pemerintahan desa, serta bertanggung jawab atas seluruh kegiatan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat desa. Kepala desa juga berperan sebagai perwakilan desa dalam hubungan dengan pihak luar, baik pemerintah kecamatan maupun lembaga lainnya. Selain itu, kepala desa wajib menjaga ketertiban, keamanan, dan kesejahteraan masyarakat di wilayahnya.

b. Sekretaris Desa

Sekretaris desa memiliki peran penting dalam mengelola administrasi pemerintahan desa. Tugas utamanya adalah menyusun rencana dan laporan kegiatan, membuat surat menyurat, mengarsip dokumen, serta menyusun

peraturan desa bersama kepala desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Sekretaris desa juga bertugas membantu penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDDes) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes), serta menyampaikan laporan pertanggungjawaban administrasi kepada instansi terkait.

c. Bendahara Desa

Bendahara desa bertugas mengelola seluruh kegiatan keuangan desa. Tugasnya mencakup menerima, menyimpan, mengeluarkan, dan mempertanggungjawabkan semua uang yang masuk dan keluar dalam pelaksanaan program desa. Ia juga menyusun laporan keuangan secara berkala dan memastikan bahwa semua penggunaan anggaran sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Bendahara bekerja sama dengan sekretaris desa dan kepala desa dalam menyusun laporan pertanggungjawaban keuangan desa yang transparan dan akuntabel.

d. Kaur Pembangunan

Kepala urusan (kaur) pembangunan bertugas membantu perencanaan, pelaksanaan, serta pemantauan kegiatan pembangunan fisik maupun nonfisik di desa. Ia bertanggung jawab dalam pengumpulan data potensi desa, pelaksanaan musyawarah perencanaan pembangunan (musrenbang), serta mendampingi pelaksanaan proyek-proyek pembangunan seperti infrastruktur jalan, irigasi, dan fasilitas umum lainnya. Kaur pembangunan juga bertugas menyusun laporan kegiatan pembangunan sebagai bahan evaluasi dan pertanggungjawaban kepada masyarakat.

e. Kaur Pemerintahan

Kaur pemerintahan mengurus hal-hal yang berkaitan dengan administrasi kependudukan, seperti pengurusan KTP, KK, surat pindah, surat keterangan, dan lainnya. Ia juga bertanggung jawab dalam membantu pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan sehari-hari, menjaga ketertiban umum, serta berkoordinasi dengan lembaga adat dan tokoh masyarakat dalam upaya menjaga harmoni sosial dan menyelesaikan masalah yang terjadi di tengah masyarakat.

f. Kaur Umum

Kaur umum memiliki tugas dalam mengelola kebutuhan logistik dan perlengkapan kantor desa, mengatur kegiatan surat menyurat tambahan, serta mendukung pelaksanaan kegiatan administrasi dan pelayanan publik. Ia juga bertanggung jawab menjaga kebersihan, keamanan, serta kenyamanan lingkungan kantor desa, serta mengatur penggunaan fasilitas desa seperti balai pertemuan dan peralatan lainnya.

g. Pelaksana Wilayah (Kepala Dusun)

Kepala dusun atau pelaksana wilayah bertugas sebagai ujung tombak pemerintahan desa di tingkat dusun. Ia menjadi penghubung langsung antara masyarakat di wilayah dusunnya dengan pemerintah desa. Kepala dusun menyampaikan informasi kebijakan desa kepada warga, mengoordinasikan kegiatan sosial kemasyarakatan di tingkat dusun, serta membantu kepala desa dalam menyelesaikan persoalan warga. Ia juga aktif dalam pendataan warga dan pengawasan kegiatan pembangunan yang berlangsung di dusunnya.

5. Struktur Organisasi Pemerintah Desa

Struktur organisasi pemerintah desa adalah susunan jabatan dan pembagian tugas antar perangkat desa yang dibentuk untuk mendukung kelancaran penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, serta pelayanan kepada masyarakat. Pemerintah Desa Pararra memiliki struktur organisasi yang mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, khususnya dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa.

Dalam menjalankan roda pemerintahan di tingkat desa, Kepala Desa tidak bekerja sendiri, melainkan dibantu oleh aparatur desa yang memiliki tugas dan fungsi masing-masing. Struktur organisasi desa dibentuk untuk memastikan bahwa setiap program dan kebijakan, termasuk dalam hal pengelolaan dan pendistribusian pupuk bersubsidi, dapat berjalan secara efektif, efisien, dan tepat sasaran.

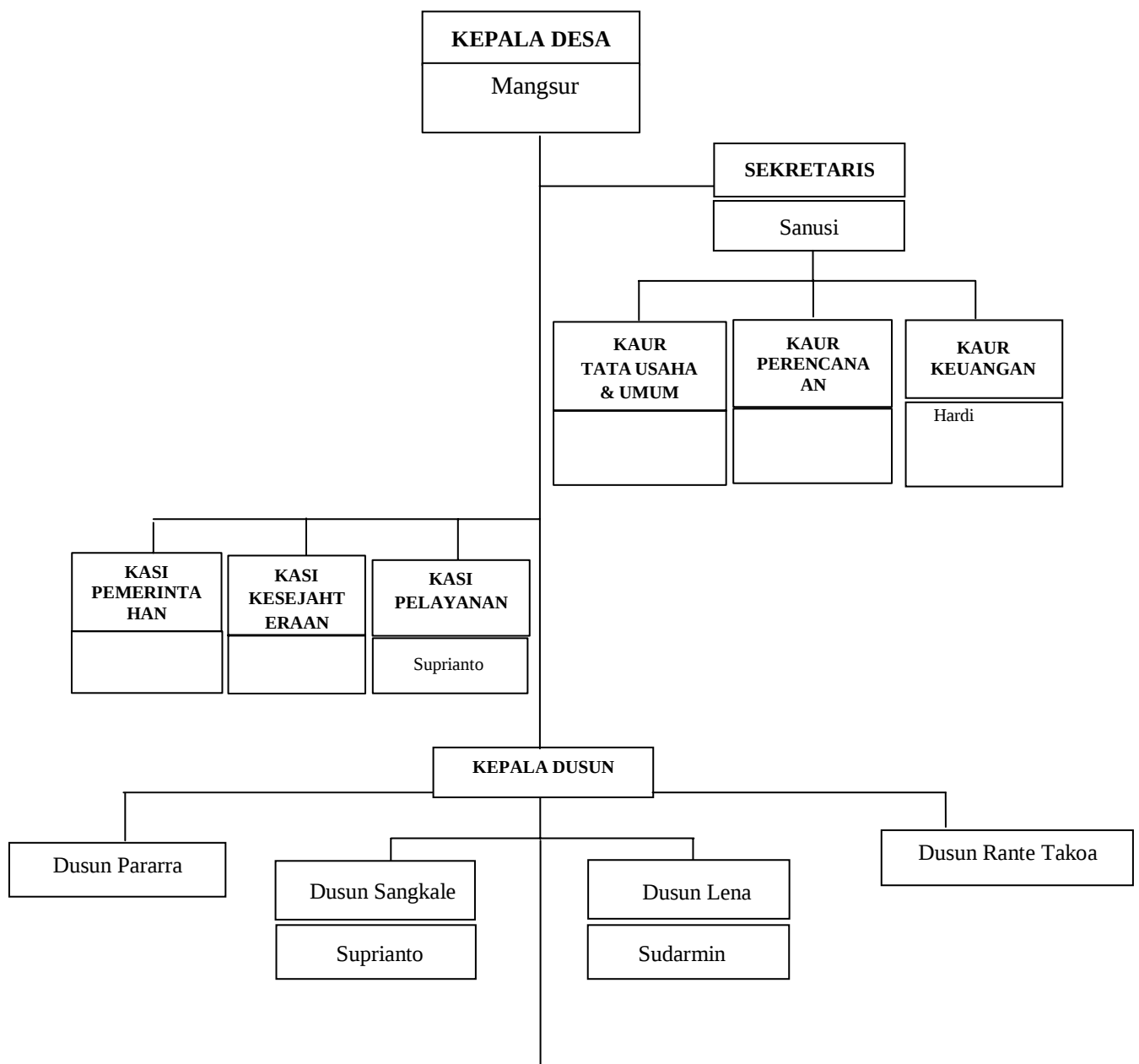
Organisasi pemerintahan desa terdiri dari perangkat desa seperti Sekretaris Desa, Kepala Urusan, dan Kepala Seksi, serta lembaga pendukung lainnya. Koordinasi antarlembaga ini menjadi kunci dalam pelaksanaan kebijakan di tingkat lokal.

Berikut adalah struktur organisasi Pemerintah Desa Pararra Kecamatan Sabbang,
Kabupaten Luwu Utara:

**Susunan Organisasi Tata Kerja Pemerintahan Desa Pararra
(Berdasarkan Peraturan Bupati Luwu Utara Nomor 18 Tahun 2018)**

Desa Pararra Kec. Sabbang – Kab Luwu Utara

Gambar 2. Struktural Pemerintah Desa Pararra



Banser

Dusun Saluturunan
Wandi

6. Demografi Desa

a. Batasan wilayah

Berdasarkan data yang diperoleh dari kantor desa pararra berbatasan dengan 4 wilayah lain, berikut adalah batasan-batasan Desa Parrearra:

Tabel 4.1 Batasan Desa Pararra

No	Arah	Batas Desa
1.	Sebelah Utara	Desaa Malimbu
2.	Sebelah Timur	Desa Tulak Tallu
3.	Sebelah Selatan	Desa Bungin/Klotok
4.	Sebelah Barat	Desa Tandung

Sumber Data : Profil Desa

1) Luas Wilayah

Desa Pararra memiliki luas wilayah sekitar **9.996,9 hektare**,

Kaso Abadi

nya salah satu desa dengan cakupan lahan yang cukup luas di

Kecamatan Sabbang, Kabupaten Luwu Utara. Wilayah yang luas ini mencakup berbagai jenis lahan yang dimanfaatkan untuk kepentingan pertanian, pemukiman, dan fasilitas sosial-ekonomi masyarakat.

a) Keadaan Topografi

Secara umum, topografi Desa Pararra tergolong dataran yang relatif landai, sehingga cocok untuk kegiatan pertanian dan permukiman. Pembagian penggunaan lahannya meliputi:

- 1) Sawah seluas 20 hektare, yang digunakan oleh masyarakat untuk menanam padi dan memenuhi kebutuhan pangan lokal.
- 2) Pekarangan/pemukiman seluas 2,88 hektare, yang merupakan area tempat tinggal penduduk dan aktivitas rumah tangga sehari-hari.
- 3) Tegal/kebun seluas 30,25 hektare, dimanfaatkan untuk menanam berbagai jenis tanaman seperti kakao, kelapa, dan sayuran.
- 4) Fasilitas sosial dan ekonomi mencakup 3,50 hektare, yang terdiri atas bangunan publik seperti sekolah, masjid, kantor desa, serta pasar dan lapangan olahrag.

7. Wilayah Administrasi Pemerintah Desa

Desa Pararra terdiri dari 5 dusun yakni desa pararra, dusun sangkale, dusun rante takoa, dusun lena, dusun salu turunan dengan jumlah Rukun Tetangga (RT) sebanyak 5

Tabel 4.2 Nama-Nama Dusun Dan Jumlah Rukun Tetangga

Dusun	Jumlah RT	Luas Wilayah
Parrearra	1 RT	9996,9 Ha
Sangkale	1 RT	
Rante takoa	1 RT	
Lena	1 RT	
Salu Turunan	1 RT	

Sumber data : Profil Desa

8. Jumlah Penduduk

Desa Pararra memiliki jumlah penduduk sebanyak 1.247 jiwa yang tersebar dalam beberapa dusun di wilayah desa. Penduduk tersebut terdiri dari berbagai kelompok usia dan latar belakang sosial, dengan mata pencaharian utama di bidang pertanian, perkebunan, dan sebagian kecil di sektor perdagangan serta jasa.

Jumlah kepala keluarga (KK) di Desa Pararra tercatat sebanyak 362 KK, dengan total anggota keluarga sebanyak 885 jiwa. Hal ini mencerminkan struktur keluarga yang cukup beragam, baik dari segi jumlah anggota maupun kondisi sosial ekonominya. Dengan jumlah penduduk tersebut, pemerintah desa terus berupaya meningkatkan pelayanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur guna menunjang kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh.

Tabel 4. 3 Jumlah Penduduk Desa Pararra Berdasarkan Jenis Kelamin Tahun 2021

Jumlah Penduduk			
Jenis kelamin	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021
Laki-laki	623	678	682
Perempuan	519	585	623
Jumlah	1142	1263	1305
	Naik/turun % Dari tahun sebelumnya	Naik/turun 3 % Dari tahun sebelumnya	Naik/turun 4 % Dari tahun sebelumnya

Sumber Data : Profil Desa Pararra 2021

Seperti terlihat dalam table di atas, menunjukkan adanya kenaikan jumlah penduduk dari tahun ke tahun yang secara detail dapat dilihat dalam tabel berikut ini.

Tabel 4. 4 Jumlah penduduk berdasarkan struktur usia tahun 2021

No	Kelompok usia	L	P	Jumlah	Prosentase (%)
1	0-5	63	55	118	9,04 %
2	6-12	66	61	127	9,7 %
3	13-17	57	31	89	6,8 %
4	18-21	46	46	92	7,1 %
5	22-30	116	72	188	14,4 %
6	31-45	168	125	293	22,5 %
7	46-55	70	64	134	10,3 %
10	>56	96	268	364	27,9 %
	Jumlah	682	623	1305	100%

Sumber : profil desa

Dari total jumlah penduduk desa pararra, yang dapat dikategorikan kelompok rental dari sisi Kesehatan mengingat usia yaitu penduduk yang berusia

>56 tahun, jumlah yang dicapai 27,9 % . usia 0-5 tahun ada 9,04 % sedangkan usia 5-18 tahun, ada 25 % . sementara usia 18-60 tahun ada 55 % yang dikategorikan sebagai usia produktif.

9. Keadaan sosial

a. Sumber daya manusia

Sasaran akhir dari setiap pembangunan bermuara pada peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM). SDM merupakan subyek dan sekaligus objek pembangunan, mencakup seluruh siklus kehidupan manusia, sejak kandungan hingga akhir hayat. oleh karena itu pembangunan kualitas manusia harus menjadi perhatian penting pada saat ini SDM desa pararra cukup baik dibandingkan pada masa-masa sebelumnya.

Tabel 4. 5 Penduduk Usia produktif berdasarkan pekerjaan

No	Usia (Tahun)	Jenis kelamin		Pekerjaan								RTM	Jumlah
		L	P	Petani	Buruh	Pedagang	ASN	pengusaha	Pekerja informal	Lain lain	pengangguran		
1	17-25	78	24	38	4	4	5	6	2	10	48	65	%
2	25-35	84	42	30	21	7	6	7	5	13	54	88	%
3	35-50	88	42	32	29	6	5	9	2	12	35	90	%
4	50-60	127	78	89	54	22	4	5	2	14	12	78	%
5	60	96	59	44	32	30	0	2	0	15	32	85	%

	Jumlah	718	718		100%
--	--------	-----	-----	--	------

Sumber Data : Desa Pararra tahun 2021

Dari data diatas dapat peneliti simpulkan bahwa jumlah keseluruhan petani di semua umur adalah 233 orang yang mengelolah sekitar 4-5 hektar tanah yang diolah di Desa Pararra

b. Pendidikan

Pendidikan kesadaran adalah satu hal yang penting dalam memajukan tingkat perekonomian pada khususnya, dengan tingkat Pendidikan yang tinggi maka diharapkan mampu menjadi pendorong perekonomian masyarakat dengan ketersediaan sumber daya manusia yang mampu mengelola potensi yang ada di desa pararra. Tingkat Pendidikan masyarakat Desa Pararra dapat dilihat di table di bawah ini.

Tabel 4. 6 Perkembangan Penduduk Desa Pararra Menurut Pendidikan Terakhir Tahun 2021

No	Keterangan	Jumlah penduduk		
		Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021
1	Tidak tamat sekolah SD	165	168	170
2	Tamat sekolah SD	32	29	33
3	Tamat sekolah SLTP	33	32	61
4	Tamat SMU	44	32	46
5	Tamat akademi / D1/D11/D111	0	0	0
6	Tamat strata1	32	22	40
7	Tamat strata II	0	0	0
	Jumlah	247	286	350

Sumber : profil desa

Tabel 4. 7 Angka Putus Sekolah Tahun 2019-2021

Tahun	SD/MI	SMP/MTS	SMA/MA
2019	7	1	22
2020	8	1	25
2021	5	1	35

Jumlah	20	3	82
--------	----	---	----

Sumber : profil desa

Dari tersebut menunjukkan bahwa angka putus sekolah menurun sepanjang tiga tahun terakhir sehingga perlu dilakukan Langkah-langkah strategis dalam mempertahankan ini.

Tabel 4. 8 Jumlah sekolah dan siswa menurut jenjang Pendidikan

No	Tingkatan Sekolah	Jumlah Sekolah	Jumlah Siswa
1	Pendidikan anak usia dini :	1	23
2	TK	0	
3	Sekolah dasar :	2	164
4	SMP/ MTs :	0	0
5	SMU/SMK/MA :	0	0

c. Kesehatan

Peningkatan derajat Kesehatan masyarakat di desa pararra antara lain dapat dilihat dari status Kesehatan, serta pola penyakit status Kesehatan masyarakat antara lain dapat dinilai melalui berbagai indikator Kesehatan seperti meningkatnya usia harapan hidup dan menurunnya angka kematian bayi.

B. Hasil Penelitian

1. Kebijakan yang diterapkan oleh kepala desa dalam menangani kelangkaan pupuk di Desa Pararra

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, salah satu tujuan utama pembangunan desa adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat, termasuk petani, melalui pemenuhan kebutuhan dasar dan pengembangan ekonomi lokal. Dalam konteks Desa Pararra, kebijakan pemerintah desa dalam mengatasi kelangkaan pupuk diwujudkan melalui pelaksanaan program pupuk bersubsidi yang berfokus pada penguatan kelompok tani, kolaborasi dengan berbagai pihak, serta pengawasan distribusi yang lebih ketat.

Kebijakan ini dijalankan dengan beberapa strategi utama. Hardi, Kaur Keuangan Desa Pararra, mengungkapkan bahwa pemerintah :

“Mengaktifkan kelompok tani dan berkolaborasi dengan pangkalan pupuk yang dipusatkan di kecamatan untuk mengatasi kelangkaan pupuk.”¹²

Pengaktifan kelompok tani sebagai penyalur utama pupuk bersubsidi berfungsi tidak hanya sebagai sarana distribusi, tetapi juga sebagai wadah pendataan kebutuhan petani. Dengan demikian, pemerintah desa dapat lebih mudah mengidentifikasi jumlah dan jenis pupuk yang diperlukan oleh masing-masing anggota kelompok tani, sehingga alokasi pupuk dapat dilakukan secara lebih tepat sasaran. Hal ini juga sejalan dengan pernyataan Hardi yang menekankan pentingnya pendataan dan mendorong masyarakat yang belum tergabung dalam kelompok tani untuk segera mendaftar. Selain itu, kolaborasi dengan pangkalan pupuk di tingkat kecamatan menjadi langkah strategis dalam mengatasi hambatan distribusi yang selama ini sering menjadi kendala di lapangan. Dengan adanya koordinasi yang baik antara pemerintah desa, kelompok

¹² Hardi, Kaur Keuangan Desa Pararra, *Wawancara*, 10 April 2025

tani, dan pangkalan pupuk, diharapkan proses penyaluran pupuk dapat berjalan lancar dan mengurangi potensi penyimpangan atau keterlambatan distribusi. Strategi ini diperkuat dengan ungkapan hardi selaku aparat Desa Pararra :

“Koordinasi dengan ketua kelompok tani dan melibatkan penyuluh pertanian lapangan dalam pengawasan pembagian pupuk.”

Berdasarkan wawancara di atas, strategi pemerintah Desa Pararra dalam mengatasi kelangkaan pupuk tidak hanya berhenti pada pengaktifan kelompok tani dan kolaborasi dengan pangkalan pupuk, tetapi juga diperkuat dengan adanya koordinasi intensif dengan ketua kelompok tani dan pelibatan penyuluh pertanian. Langkah strategis ini menunjukkan pendekatan komprehensif yang diterapkan pemerintah desa dalam memastikan distribusi pupuk bersubsidi berjalan efektif. Koordinasi dengan ketua kelompok tani menjadi kunci penting dalam memastikan informasi kebutuhan pupuk dari petani dapat tersampaikan dengan baik kepada pemerintah desa. Ketua kelompok tani berperan sebagai penghubung antara anggota kelompok dengan pemerintah desa, sehingga dapat mempermudah proses pendataan dan distribusi pupuk.

Selain itu, pelibatan penyuluh pertanian lapangan dalam pengawasan pembagian pupuk menambah lapisan pengawasan yang dapat meminimalisir penyimpangan dalam distribusi. Hardi, Kaur Keuangan Desa menyatakan bahwa :

“Tanggapan petani cukup baik, namun diharapkan ke depan penyediaan pupuk lebih efektif agar petani lebih sejahtera.”¹³

Pernyataan ini menunjukkan bahwa meskipun program pupuk bersubsidi sudah berjalan dan mendapat respon positif, masih terdapat tantangan dalam memastikan ketersediaan pupuk yang cukup dan tepat waktu sehingga manfaatnya dapat dirasakan secara optimal oleh petani. Selain itu, Hardi menegaskan :

“Memaksimalkan pengurangan kelangkaan pupuk dengan mendata kebutuhan petani dan mendorong masyarakat yang belum terdaftar dalam kelompok tani untuk segera mendaftar.”

Pendataan yang akurat menjadi aspek krusial dalam perencanaan distribusi pupuk agar alokasi dapat dilakukan secara tepat sasaran dan menghindari kekurangan maupun pemborosan. Upaya mendorong petani yang belum tergabung dalam kelompok tani untuk mendaftar juga merupakan langkah strategis untuk memperluas cakupan penerima manfaat dan meningkatkan keteraturan distribusi. Senada dengan itu, Hal ini sejalan dengan prinsip pembangunan desa yang menekankan pada penguatan kelembagaan lokal dan partisipasi masyarakat sebagai kunci keberhasilan program pembangunan, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Dengan demikian, penguatan kelompok tani tidak hanya berfungsi sebagai mekanisme distribusi, tetapi juga sebagai media pemberdayaan petani untuk meningkatkan kesejahteraan mereka.

Dalam upaya mengatasi kelangkaan pupuk di Desa Pararra, pemerintah desa telah mengambil berbagai langkah strategis yang bertujuan untuk

¹³ Hardi, Kaur Keuangan Desa Pararra, *Wawancara*, 10 April 2025

memastikan ketersediaan pupuk bersubsidi dapat terpenuhi secara tepat waktu dan tepat sasaran. Pendekatan yang diambil tidak hanya berfokus pada penyediaan pupuk, tetapi juga pada penguatan kelembagaan lokal, khususnya kelompok tani, sebagai mitra utama dalam distribusi dan pengawasan pupuk. Hal ini penting mengingat kelompok tani memiliki peran sentral dalam menjembatani kebutuhan petani dengan pemerintah desa dan pihak distributor pupuk. Seperti yang diungkapkan Dedi kepala dusun :

“Strategi kami adalah mendata anggota kelompok tani agar distribusi tepat sasaran”

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, dapat disimpulkan bahwa kebijakan¹⁴ pemerintah desa melalui program pupuk bersubsidi di Desa Pararra telah menunjukkan kemajuan yang signifikan. Pengaktifan kelompok tani sebagai ujung tombak distribusi pupuk dan keterlibatan penyuluh pertanian dalam pengawasan merupakan strategi efektif yang membantu mengatasi kelangkaan pupuk.

Selain itu, koordinasi yang efektif antara pemerintah desa, ketua kelompok tani, dan penyuluh pertanian lapangan menjadi kunci keberhasilan dalam memastikan pupuk bersubsidi sampai kepada petani yang membutuhkan. Pengawasan yang dilakukan secara langsung oleh penyuluh pertanian juga diharapkan dapat meminimalisir penyimpangan dan memastikan penggunaan pupuk sesuai dengan peruntukannya. Seperti yang diungkapkan Dedi kepala dusun:

“Tanggapan petani sudah mulai merasa cukup, namun distribusi pupuk belum merata.”¹⁵

¹⁴ Dedi kepala dusun, *Wawancara*, 10 April 2025

¹⁵ Dedi kepala dusun, *Wawancara*, 10 April 2025

Pernyataan ini menandakan bahwa upaya pemerintah desa dalam mengoptimalkan mekanisme distribusi pupuk bersubsidi mulai membuahkan hasil positif. Perbaikan distribusi ini sangat penting mengingat kelangkaan pupuk selama ini menjadi salah satu kendala utama yang menghambat produktivitas pertanian di desa. Dengan distribusi yang lebih lancar dan tepat waktu, petani dapat memperoleh pupuk sesuai dengan kebutuhan mereka, sehingga mendukung peningkatan hasil panen dan kesejahteraan petani, Seperti yang di ungkapkan Suprianto aparat desa :

“kebijakan yang diterapkan adalah membentuk kelompok tani untuk distribusi pupuk bersubsidi, tanggapan petani sudah merasa terbantu, rencana kedepan adalah memastikan masyarakat terdaftar dalam kelompok tani dan memasifkan pengawalan proposal pengadaan pupuk”¹⁶

Berdasarkan wawancara di atas menunjukkan bahwa pembentukan kelompok tani menjadi salah satu kebijakan strategis yang diterapkan pemerintah desa dalam rangka memperbaiki distribusi pupuk bersubsidi. Dengan adanya kelompok tani sebagai mitra utama, distribusi pupuk dapat dilakukan secara lebih terorganisir dan tepat sasaran, sehingga petani merasa terbantu dalam mendapatkan pupuk sesuai kebutuhan mereka. Hal ini sangat penting mengingat kelangkaan pupuk selama ini menjadi kendala utama yang menghambat produktivitas pertanian di Desa Pararra. Rencana pemerintah desa untuk memastikan seluruh masyarakat terdaftar dalam kelompok tani dan memassifkan pengawalan proposal pengadaan pupuk menunjukkan komitmen untuk meningkatkan efektivitas dan transparansi dalam pelaksanaan program pupuk bersubsidi. Pendataan yang akurat dan pengawasan yang ketat sangat diperlukan

¹⁶ Suprianto aparat desa, *Wawancara*, 11 April 2025

agar pupuk bersubsidi dapat sampai kepada petani yang berhak dan digunakan sesuai dengan tujuan peningkatan hasil pertanian.

Secara umum, pelaksanaan kebijakan pupuk bersubsidi di Desa Pararra telah menunjukkan perbaikan, terutama dalam hal koordinasi dan pengawasan distribusi. Namun, tantangan seperti pemerataan distribusi dan pendataan kebutuhan petani masih menjadi pekerjaan rumah yang harus terus disempurnakan. Efektivitas kebijakan pemerintah desa melalui program pupuk bersubsidi di Desa Pararra sudah mulai terasa manfaatnya bagi petani, terutama dengan adanya penguatan kelompok tani dan peran aktif penyuluh pertanian. Meski demikian, distribusi pupuk yang belum sepenuhnya merata dan masih adanya kendala ketersediaan menunjukkan perlunya peningkatan dalam pendataan dan pengawasan. Harapan dari para petani dan aparat desa adalah agar kebijakan ini terus disempurnakan sehingga dapat benar-benar mengatasi kelangkaan pupuk dan meningkatkan kesejahteraan petani di masa mendatang.

2. Kebijakan kepala Desa Pararra sudah efektif dalam menangani kelangkaan pupuk

Penelitian ini mengkaji efektivitas pelaksanaan program pupuk bersubsidi di Desa Pararra, Kabupaten Luwu Utara, dengan fokus pada mekanisme distribusi, sosialisasi, pengawasan, dan peran penyuluh. Hasil wawancara dengan responden utama disajikan secara langsung dalam kutipan.

a. Mekanisme Distribusi Pupuk Bersubsidi

Distribusi pupuk bersubsidi merupakan aspek krusial dalam mendukung sektor pertanian. Di Desa Pararra, penyaluran pupuk bersubsidi dilakukan melalui

mekanisme yang melibatkan kelompok tani sebagai ujung tombak. Proses ini dirancang untuk memastikan pupuk sampai kepada petani yang membutuhkan dengan cara yang terstruktur dan terorganisir. Hardi menyatakan bahwa:

“Distribusi melalui kelompok tani, masing-masing kelompok terdiri dari 20 anggota dan tersebar di lima dusun”¹⁷

Pernyataan ini mengindikasikan bahwa setiap kelompok tani memiliki cakupan wilayah yang spesifik, yang bertujuan untuk memastikan distribusi pupuk bersubsidi dapat menjangkau seluruh petani di Desa Pararra secara merata. Dengan anggota yang tersebar di berbagai dusun, kelompok tani dapat lebih memahami kebutuhan pupuk di setiap wilayah dan meminimalkan risiko ketidakmerataan distribusi. Sistem ini juga memungkinkan adanya koordinasi yang lebih baik antara petani, kelompok tani, dan pemerintah desa dalam perencanaan dan pelaksanaan program pupuk bersubsidi. Efektivitas program pupuk bersubsidi sangat bergantung pada ketepatan penyaluran pupuk setelah sampai di tingkat desa. Selain itu Dedi mengatakan bahwa:

“Jika pupuk sudah sampai di desa, distribusi sudah tepat sasaran.”¹⁸

Pernyataan ini mengindikasikan bahwa tantangan utama dalam distribusi pupuk bersubsidi terletak pada rantai pasokan dari tingkat pusat hingga desa. Ketika pupuk telah berhasil mencapai desa, mekanisme distribusi lokal dianggap cukup efektif dalam menjangkau petani yang membutuhkan. Hal ini menunjukkan pentingnya penguatan logistik dan koordinasi antara pemerintah, distributor, dan kelompok tani untuk memastikan pupuk sampai di desa tepat waktu dan dalam

¹⁷ Hardi, Kaur Keuangan Desa Pararra, *Wawancara*, 10 April 2025

¹⁸ Dedi kepala dusun, *Wawancara*, 10 April 2025

kondisi yang baik, sehingga tujuan program pupuk bersubsidi dapat tercapai secara optimal. Sementara itu, Suprianto menyatakan bahwa:

“Mekanisme distribusi dua tahun terakhir sudah membaik.”¹⁹

Pernyataan ini menunjukkan adanya upaya perbaikan yang signifikan dalam sistem distribusi pupuk bersubsidi di Desa Pararra dalam kurun waktu tersebut. Peningkatan ini dapat mencakup berbagai aspek, seperti efisiensi logistik, koordinasi antar pihak terkait, transparansi penyaluran, atau peningkatan pengawasan. Dampak positif dari perbaikan ini diharapkan dapat dirasakan langsung oleh petani, dengan ketersediaan pupuk yang lebih terjamin dan tepat waktu. Untuk memastikan keberlanjutan perbaikan ini, evaluasi berkala dan identifikasi area yang masih memerlukan perhatian lebih lanjut tetap diperlukan.

Para petani seperti Amin Jaya dan Asdin juga menyatakan bahwa:

“Dalam pelaksanaan program pupuk bersubsidi di Desa Pararra, kelompok tani memegang peranan penting sebagai perantara distribusi kepada petani”²⁰

Sistem ini dirancang untuk mempermudah akses petani terhadap pupuk, sekaligus memastikan penyaluran yang tepat sasaran. Salah satu petani menyampaikan bahwa, Dalam pelaksanaan program pupuk bersubsidi di Desa Pararra, kelompok tani memegang peranan penting sebagai perantara distribusi kepada petani. Sistem ini dirancang untuk mempermudah akses petani terhadap pupuk, sekaligus memastikan penyaluran yang tepat sasaran. Salah satu petani menyampaikan bahwa.

b. Sosialisasi Program Pupuk Bersubsidi

¹⁹ Suprianto aparat desa, *Wawancara*, 11 April 2025

²⁰ Amin Jaya dan Asdin, Petani, *Wawancara*, 12 April 2025

Sosialisasi program pupuk bersubsidi merupakan tahapan penting untuk memastikan petani memahami mekanisme, manfaat, dan persyaratan dalam mengakses pupuk bersubsidi. Namun, fakta di lapangan menunjukkan adanya peran yang berbeda antara pemerintah desa dan kelompok tani dalam melaksanakan sosialisasi ini. Hardi menyatakan bahwa:

“Belum ada sosialisasi dari pemerintah desa, namun kelompok tani melakukan sosialisasi kepada anggotanya.”²¹

Hal ini mengindikasikan bahwa kelompok tani mengambil inisiatif untuk mengisi kekosongan peran sosialisasi dari pemerintah desa. Meskipun demikian, efektivitas sosialisasi oleh kelompok tani tetap perlu dievaluasi lebih lanjut, mengingat cakupan dan sumber daya yang terbatas dibandingkan dengan pemerintah desa. Idealnya, sosialisasi yang komprehensif melibatkan kedua belah pihak untuk memastikan informasi yang akurat dan merata sampai kepada seluruh petani sasaran.

Sosialisasi mengenai program pupuk bersubsidi merupakan salah satu langkah penting untuk memastikan petani memahami prosedur, manfaat, dan tata cara pengambilan pupuk secara tepat. Dalam pelaksanaan sosialisasi ini, penyuluh pertanian memegang peran sentral sebagai penghubung antara pemerintah dan petani. Dedi menyatakan bahwa:

“Sosialisasi dilakukan melalui penyuluh yang mengumpulkan anggota kelompok tani.”²²

²¹ Hardi, Kaur Keuangan Desa Pararra, *Wawancara*, 10 April 2025

²² Dedi Kepala Dusun, *Wawancara*, 10 April 2025

Hasil wawancara ini menunjukkan bahwa penyuluh pertanian secara aktif mengorganisir pertemuan dengan anggota kelompok tani untuk menyampaikan informasi terkait program pupuk bersubsidi. Metode ini memungkinkan penyampaian informasi secara langsung dan interaktif, sehingga petani dapat memperoleh pemahaman yang lebih baik serta kesempatan untuk bertanya dan berdiskusi. Dengan demikian, peran penyuluh sebagai fasilitator sosialisasi sangat penting dalam meningkatkan kesadaran dan partisipasi petani dalam program pemerintah desa.

Sosialisasi program pupuk bersubsidi merupakan tahap penting untuk memastikan petani memahami mekanisme dan manfaat program tersebut sehingga dapat memanfaatkan pupuk dengan tepat. Dalam konteks Desa Pararra, sosialisasi tidak hanya dilakukan oleh pemerintah desa atau penyuluh pertanian, tetapi juga melalui peran aktif kelompok tani sebagai wadah komunikasi dan koordinasi antar petani. Suprianto menyatakan bahwa:

“Sosialisasi dilakukan melalui kelompok tani”²³

Pernyataan ini menegaskan bahwa kelompok tani berfungsi sebagai media penyebaran informasi yang efektif kepada anggotanya. Melalui pertemuan rutin dan komunikasi internal kelompok, informasi mengenai tata cara pengambilan pupuk, jadwal distribusi, serta aturan penggunaan dapat tersampaikan dengan baik. Dengan demikian, kelompok tani tidak hanya berperan sebagai penyalur

²³ Suprianto aparat desa, *Wawancara*, 11 April 2025

pupuk, tetapi juga sebagai agen sosialisasi yang membantu meningkatkan pemahaman dan partisipasi petani dalam program pupuk bersubsidi.

c. Pengawasan Penyaluran Pupuk Bersubsidi

Pengawasan terhadap penyaluran pupuk bersubsidi merupakan bagian penting untuk memastikan bahwa pupuk yang disalurkan benar-benar digunakan sesuai dengan peruntukannya dan tepat sasaran. Dalam pelaksanaan pengawasan di tingkat desa, dilakukan berbagai upaya untuk memantau penggunaan pupuk oleh petani agar tidak terjadi penyimpangan atau penyelewengan. Hardi menyatakan bahwa:

“Pengawasan dilakukan saat petani selesai panen, menanyakan penggunaan pupuk yang dibagikan.”

Pernyataan ini menunjukkan bahwa pengawasan tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga melibatkan interaksi langsung dengan petani untuk memastikan pupuk yang diterima telah digunakan secara tepat dan efektif. Pendekatan ini sejalan dengan pedoman pengawasan pupuk bersubsidi yang menekankan pentingnya verifikasi lapangan sebagai bagian dari mekanisme pengawasan agar distribusi pupuk dapat dikontrol secara ketat dan dapat meningkatkan akuntabilitas penggunaan pupuk di tingkat petani. Dengan demikian, pengawasan yang dilakukan setelah panen menjadi momen penting untuk evaluasi penggunaan pupuk dan sebagai dasar perbaikan mekanisme distribusi di masa mendatang.

Efektivitas program pupuk bersubsidi sangat bergantung pada sistem pengawasan yang kuat dan terstruktur, melibatkan berbagai pihak yang memiliki peran dan tanggung jawab masing-masing. Pengawasan tidak hanya dilakukan

oleh satu pihak, tetapi melibatkan kerjasama dan koordinasi antara berbagai elemen. Dedi menjelaskan bahwa:

“Pengawasan dari penyuluh hingga ketua kelompok tani”²⁴

Pernyataan ini mengindikasikan bahwa sistem pengawasan melibatkan penyuluh pertanian yang memiliki pengetahuan teknis dan pemahaman tentang kondisi lapangan, serta ketua kelompok tani yang memiliki kedekatan dengan anggota kelompok dan mengetahui kebutuhan serta penggunaan pupuk di tingkat petani. Dengan melibatkan berbagai pihak dalam pengawasan, diharapkan dapat tercipta sistem pengawasan yang komprehensif dan efektif dalam mencegah penyimpangan serta memastikan pupuk bersubsidi digunakan sesuai dengan peruntukannya.

Pengawasan terhadap penyaluran dan penggunaan pupuk bersubsidi menjadi aspek penting dalam menjamin keberhasilan program pemerintah desa. Pengawasan yang efektif dapat mencegah penyalahgunaan dan memastikan pupuk digunakan sesuai dengan kebutuhan petani. Suprianto menyatakan bahwa:

“Pengawasan tetap dilakukan melalui kelompok tani.”²⁵

Pernyataan ini menunjukkan bahwa kelompok tani memegang peranan sentral dalam proses pengawasan di tingkat lapangan. Sebagai organisasi yang langsung berhubungan dengan anggota petani, kelompok tani memiliki kemampuan untuk memantau penggunaan pupuk secara langsung dan memberikan laporan kepada pihak terkait. Dengan pengawasan yang dilakukan

²⁴ Dedi Kepala Dusun, *Wawancara* 10 April 2025

²⁵ Suprianto aparat desa, *Wawancara*, 11 April 2025

oleh kelompok tani, diharapkan distribusi dan pemanfaatan pupuk bersubsidi dapat berjalan dengan transparan dan akuntabel, sehingga tujuan program dapat tercapai secara optimal.

d. Peran Penyuluh Pertanian

Peran penyuluh pertanian sangat krusial dalam pelaksanaan program pupuk bersubsidi karena mereka bertindak sebagai penghubung antara pemerintah dan petani, sekaligus sebagai pendamping teknis di lapangan. Penyuluh pertanian berperan aktif dalam berbagai kegiatan koordinasi dan pendampingan yang bertujuan memastikan program berjalan sesuai rencana dan kebutuhan petani terpenuhi secara tepat. Hardi menyatakan bahwa:

“Penyuluh pertanian sangat aktif hadir dalam rapat koordinasi.”²⁶

Pernyataan ini menunjukkan bahwa penyuluh tidak hanya hadir secara fisik, tetapi juga berkontribusi dalam membahas strategi dan solusi terkait pelaksanaan program pupuk bersubsidi. Dedi menyatakan bahwa:

“Penyuluh terlibat aktif mendukung kebijakan.”²⁷

Hal ini menegaskan bahwa penyuluh pertanian tidak hanya sebagai pelaksana teknis, tetapi juga sebagai pendukung kebijakan yang membantu mensosialisasikan dan mengimplementasikan program secara efektif di tingkat desa dan kelompok tani. Keterlibatan aktif penyuluh dalam rapat koordinasi dan dukungan kebijakan ini penting untuk memastikan bahwa kebutuhan pupuk sesuai dengan kondisi lapangan dan distribusi berjalan dengan lancar. Dengan demikian, peran penyuluh pertanian sebagai fasilitator, motivator, dan edukator menjadi

²⁶ Hardi, Kaur Keuangan, *Wawancara*, 10 April 2025

²⁷ Dedi Kepala Dusun, *Wawancara*, 10 April 2025

kunci keberhasilan program pupuk bersubsidi dalam meningkatkan produktivitas pertanian dan kesejahteraan petani.

Peran penyuluh pertanian dalam pelaksanaan program pupuk bersubsidi sangat menentukan keberhasilan distribusi dan penggunaan pupuk secara tepat sasaran. Penyuluh tidak hanya berfungsi sebagai penghubung antara pemerintah dan petani, tetapi juga sebagai pendamping teknis yang memberikan bimbingan dan edukasi kepada petani. Suprianto menyatakan bahwa:

“Peran penyuluh sudah baik.”²⁸

Pernyataan ini mencerminkan bahwa keterlibatan penyuluh dalam berbagai tahapan program, mulai dari sosialisasi, koordinasi, hingga pengawasan, telah berjalan dengan efektif. Dengan peran yang baik tersebut, penyuluh mampu membantu petani memahami prosedur penggunaan pupuk bersubsidi dan mendorong pemanfaatan pupuk secara optimal. Keberhasilan peran penyuluh ini menjadi salah satu faktor penting dalam meningkatkan produktivitas pertanian dan mendukung pencapaian tujuan program pemerintah desa.

Berdasarkan hasil wawancara, pelaksanaan program pupuk bersubsidi di Desa Pararra telah menunjukkan perbaikan dari segi mekanisme distribusi, sosialisasi, pengawasan, dan peran penyuluh. Distribusi melalui kelompok tani dinilai efektif dalam mengatasi kelangkaan pupuk dan memastikan pupuk bersubsidi tepat sasaran. Namun, masih terdapat ruang untuk meningkatkan sosialisasi langsung dari pemerintah desa agar informasi lebih merata dan transparan di kalangan petani.

²⁸ Suprianto, Aparat Desa, *Wawancara*, 11 April 2025

3. Faktor pendukung dan penghambat kepala Desa dalam menangani kelangkaan pupuk di Desa Pararra

Penelitian ini mengkaji kebijakan yang diambil oleh Kepala Desa Pararra dalam mengatasi kelangkaan pupuk bersubsidi serta bagaimana kebijakan tersebut berdampak pada ketersediaan dan aksesibilitas pupuk bagi petani. Data diperoleh melalui wawancara dengan beberapa responden kunci, yaitu perangkat desa dan petani.

a. Kebijakan Kepala Desa dalam Menangani Ketersediaan Pupuk

Kepala Desa Pararra menyadari betul pentingnya peran pupuk bersubsidi dalam meningkatkan produktivitas pertanian dan kesejahteraan petani di wilayahnya. Oleh karena itu, berbagai langkah strategis telah diambil untuk memastikan ketersediaan pupuk dan kemudahan akses bagi petani. Salah satu fokus utama adalah penguatan kelompok tani sebagai garda depan dalam penyaluran pupuk bersubsidi. Kepala Desa Pararra mengambil beberapa langkah strategis untuk memastikan ketersediaan pupuk bersubsidi bagi petani melalui penguatan peran kelompok tani dan kolaborasi dengan berbagai pihak terkait. Hardi menyampaikan bahwa, Hardi menyatakan bahwa:

“Mengaktifkan kelompok tani, kolaborasi dengan pangkalan pupuk, koordinasi dengan ketua kelompok tani, melibatkan penyuluh pertanian.”²⁹

Pernyataan ini menggambarkan komitmen Kepala Desa dalam memberdayakan kelompok tani agar mampu menjalankan fungsi distribusi pupuk secara efektif dan efisien. Selain itu, kolaborasi dengan berbagai pihak terkait, seperti pangkalan pupuk, ketua kelompok tani, dan penyuluh pertanian, juga

²⁹ Hardi, Kaur Keuangan, *Wawancara* 10 April 2025

menjadi kunci untuk memastikan ketersediaan pupuk dan kelancaran proses distribusi di lapangan. Dengan pendekatan yang komprehensif ini, diharapkan petani di Desa Pararra dapat memperoleh pupuk bersubsidi dengan mudah dan tepat waktu, sehingga mampu meningkatkan hasil panen dan kesejahteraan mereka. Salah satu langkah konkret yang diambil oleh Kepala Desa Pararra dalam mengatasi kelangkaan pupuk bersubsidi adalah dengan membangun sistem distribusi yang terorganisir melalui pembentukan kelompok tani. Kebijakan ini bertujuan untuk memudahkan pendataan, pengawasan, dan penyaluran pupuk agar tepat sasaran kepada para petani yang membutuhkan. Selain itu, pendataan anggota kelompok tani menjadi dasar dalam menentukan alokasi pupuk sesuai kebutuhan di lapangan. Selain itu pernyataan ini di dukung oleh Dedi yang menyatakan bahwa:

“Membentuk kelompok tani, mendata anggota untuk distribusi, mengawal proposal pengadaan pupuk.”³⁰

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa Kepala Desa tidak hanya fokus pada pembentukan kelembagaan petani, tetapi juga aktif dalam proses administratif, seperti pendataan anggota dan pengawalan proposal pengadaan pupuk ke instansi terkait. Dengan demikian, proses distribusi pupuk dapat berjalan lebih transparan dan akuntabel, serta memastikan bahwa pupuk bersubsidi benar-benar diterima oleh petani yang berhak. Upaya ini juga memperkuat koordinasi antara pemerintah desa, kelompok tani, dan pihak terkait lainnya dalam rangka meningkatkan efektivitas kebijakan penanganan kelangkaan pupuk di Desa Pararra.

³⁰ Dedi Kepala Dusun, *Wawancara*, 10 April 2025

Selain penguatan kelembagaan kelompok tani, Kepala Desa Pararra juga berupaya meningkatkan efektivitas kebijakan melalui pengawasan dan kolaborasi dengan berbagai pihak eksternal. Langkah ini dilakukan untuk memastikan bahwa distribusi pupuk bersubsidi berjalan dengan lancar dan tepat sasaran, serta untuk meminimalisir kendala yang mungkin terjadi di lapangan. Suprianto menyatakan bahwa:

“Membentuk kelompok tani, meningkatkan pengawasan, kerjasama dengan distributor dan pemerintah daerah.”³¹

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa Kepala Desa tidak hanya fokus pada pembentukan kelompok tani, tetapi juga memperkuat pengawasan dalam proses distribusi pupuk agar tidak terjadi penyelewengan. Selain itu, kerjasama dengan distributor dan pemerintah daerah dipandang penting untuk memperlancar pengadaan dan distribusi pupuk bersubsidi. Dengan adanya kolaborasi yang baik antara pemerintah desa, distributor, dan pemerintah daerah, diharapkan ketersediaan pupuk di Desa Pararra dapat terjamin dan aksesibilitas bagi petani semakin mudah. Upaya ini sekaligus menjadi bentuk komitmen Kepala Desa dalam mengatasi kelangkaan pupuk dan mendukung produktivitas pertanian di wilayahnya. Pernyataan ini menegaskan bahwa selain membentuk kelompok tani, Kepala Desa juga fokus pada pengawasan dan membangun kemitraan dengan distributor serta pemerintah daerah untuk memperkuat ketersediaan pupuk bersubsidi.

b. Kendala yang Dihadapi dalam Pelaksanaan Kebijakan

³¹ Suprianto Aparat Desa, *Wawancara*, 11 April 2025

Meskipun berbagai kebijakan telah diterapkan oleh Kepala Desa Pararra untuk mengatasi kelangkaan pupuk bersubsidi, dalam pelaksanaannya masih ditemukan beberapa kendala yang mempengaruhi efektivitas ketersediaan dan distribusi pupuk kepada petani. Salah satu kendala utama yang dihadapi berkaitan dengan aspek distribusi dan koordinasi antar pihak terkait. Hardi menyatakan bahwa:

“Keterlambatan pupuk di pangkalan kecamatan, akses pemerintah desa dengan pihak terkait belum massif”³²

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa proses distribusi pupuk dari tingkat kecamatan ke desa sering mengalami keterlambatan, sehingga berdampak pada keterlambatan petani dalam memperoleh pupuk sesuai waktu tanam yang dibutuhkan. Selain itu, akses dan komunikasi antara pemerintah desa dengan pihak-pihak terkait, seperti distributor dan instansi yang berwenang, dinilai masih kurang optimal. Kondisi ini menyebabkan upaya penanganan kelangkaan pupuk belum dapat berjalan secara maksimal dan merata di seluruh wilayah desa. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan koordinasi dan penguatan jaringan kerjasama antara pemerintah desa, distributor, dan pihak terkait lainnya guna memperlancar proses distribusi pupuk bersubsidi di Desa Pararra. Selain kendala pada aspek distribusi dan koordinasi, proses pengadaan pupuk bersubsidi di Desa Pararra juga menghadapi berbagai tantangan administratif dan teknis. Permasalahan ini berdampak pada keterlambatan serta ketidakmerataan distribusi pupuk kepada petani, sehingga tujuan utama kebijakan belum sepenuhnya tercapai. Selain itu Dedi menambahkan bahwa:

³² Hardi Kaur Keuangan, *Wawancara*, 10 April 2025

“Proses pengadaan pupuk sulit, distribusi belum merata.”³³

Hasil wawancara tersebut menunjukkan bahwa upaya pengadaan pupuk yang dilakukan oleh pemerintah desa masih menemui hambatan, baik dari sisi prosedur pengajuan, ketersediaan stok, maupun mekanisme penyaluran ke tingkat kelompok tani. Akibatnya, distribusi pupuk bersubsidi belum dapat menjangkau seluruh petani secara adil dan tepat waktu. Kondisi ini menuntut adanya evaluasi dan perbaikan dalam sistem pengadaan dan distribusi pupuk, termasuk peningkatan koordinasi dengan pihak terkait agar aksesibilitas pupuk bagi petani di Desa Pararra dapat semakin merata dan optimal. Selain permasalahan pada proses pengadaan dan distribusi, terdapat kendala mendasar yang menjadi akar permasalahan dalam program pupuk bersubsidi di Desa Pararra. Kendala ini bersifat struktural dan mempengaruhi seluruh rantai distribusi pupuk dari tingkat pusat hingga ke petani. Suprianto menyatakan bahwa:

“Kendala utama pada ketersediaan pupuk bersubsidi.”³⁴

Pernyataan ini menunjukkan bahwa masalah fundamental yang dihadapi adalah keterbatasan alokasi dan ketersediaan pupuk bersubsidi itu sendiri. Meskipun berbagai upaya telah dilakukan oleh Kepala Desa dalam mengoptimalkan distribusi, namun ketika pasokan pupuk bersubsidi dari pusat terbatas, maka akan berdampak pada seluruh sistem distribusi hingga ke tingkat petani. Kondisi ini menuntut adanya peningkatan koordinasi antara pemerintah desa dengan pemerintah daerah dan pusat untuk mengadvokasi penambahan

³³ Dedi Kepala Dusun, *Wawancara*, 10 April 2025

³⁴ Suprianto Aparat Desa, *Wawancara*, 10 April 2025

alokasi pupuk bersubsidi, serta pengembangan strategi alternatif untuk mengatasi keterbatasan ketersediaan pupuk di Desa Pararra.

c. Kerjasama dalam Mendukung Kebijakan Kepala Desa

Kerjasama antar berbagai pihak merupakan faktor penting dalam mendukung efektivitas kebijakan Kepala Desa terkait penanganan kelangkaan pupuk di Desa Pararra. Melalui kerjasama yang baik, diharapkan proses pengadaan dan distribusi pupuk bersubsidi dapat berjalan lebih lancar dan tepat sasaran. Namun, dalam pelaksanaannya, bentuk kerjasama yang terjalin masih menghadapi beberapa keterbatasan. Hardi menyatakan bahwa:

“Belum ada kerjasama langsung dengan distributor, namun ada koordinasi dengan pemerintah daerah.”³⁵

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa hingga saat ini, pemerintah desa lebih banyak membangun koordinasi dengan pemerintah daerah dalam upaya mengatasi kelangkaan pupuk, sementara hubungan langsung dengan pihak distributor pupuk belum terjalin secara formal. Kondisi ini menyebabkan proses distribusi pupuk masih bergantung pada peran pemerintah daerah sebagai perantara. Oleh karena itu, diperlukan upaya lebih lanjut untuk memperkuat kerjasama langsung antara pemerintah desa dan distributor pupuk, sehingga proses distribusi dapat lebih efisien dan aksesibilitas pupuk bagi petani di Desa Pararra semakin terjamin. Selain membangun koordinasi dengan pemerintah daerah, Kepala Desa Pararra juga mengoptimalkan peran penyuluh pertanian dan kelompok tani dalam pelaksanaan kebijakan penanganan kelangkaan pupuk. Kolaborasi ini sangat penting untuk memperlancar proses distribusi dan

³⁵ Hardi Kaur Keuangan, *Wawancara*, 10 April 2025

memastikan informasi terkait pupuk bersubsidi dapat tersampaikan dengan baik kepada seluruh petani. Dedi menyatakan bahwa:

“Kerjasama melalui penyuluh dan kelompok tani.”

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa kerjasama yang dibangun tidak hanya bersifat formal antar lembaga, tetapi juga melibatkan aktor-aktor kunci di tingkat lapangan. Penyuluh pertanian berperan dalam memberikan edukasi dan pendampingan teknis, sementara kelompok tani menjadi wadah utama bagi petani dalam mengakses pupuk bersubsidi. Dengan adanya sinergi antara penyuluh dan kelompok tani, kebijakan Kepala Desa dapat diimplementasikan secara lebih efektif, sehingga distribusi pupuk menjadi lebih terarah dan tepat sasaran di Desa Pararra. Dalam upaya memperkuat efektivitas kebijakan penanganan kelangkaan pupuk, Kepala Desa Pararra menyadari pentingnya membangun jejaring kerjasama yang luas dengan berbagai pihak. Kerjasama ini tidak hanya terbatas pada lingkup internal desa, tetapi juga melibatkan pihak eksternal seperti distributor pupuk dan pemerintah daerah. Tujuannya adalah untuk memperlancar proses pengadaan, distribusi, serta memastikan kebijakan dapat diimplementasikan secara optimal di tingkat petani. Suprianto menyatakan bahwa:

“Kerjasama dengan distributor dan pemerintah daerah untuk memassifkan kebijakan.”³⁶

Pernyataan tersebut menegaskan bahwa Kepala Desa berupaya memperluas cakupan kerjasama, tidak hanya dengan pemerintah daerah sebagai pihak regulator, tetapi juga dengan distributor sebagai penyedia utama pupuk bersubsidi. Dengan adanya kerjasama yang sinergis antara pemerintah desa,

³⁶ Suprianto Aparat Desa, *Wawancara*, 11 April 2025

distributor, dan pemerintah daerah, diharapkan distribusi pupuk dapat berjalan lebih lancar, ketersediaan pupuk di tingkat petani semakin terjamin, serta kebijakan yang diterapkan dapat memberikan dampak yang lebih luas dan merata bagi seluruh petani di Desa Pararra. Upaya ini juga menjadi bentuk komitmen pemerintah desa dalam mengatasi kelangkaan pupuk dan mendukung peningkatan produktivitas pertanian di wilayahnya.

d. Aksesibilitas Pupuk bagi Petani

Meskipun berbagai upaya telah dilakukan oleh pemerintah desa untuk meningkatkan ketersediaan pupuk, dari sudut pandang petani, akses terhadap pupuk bersubsidi masih menjadi isu yang kompleks. Terdapat indikasi bahwa kebijakan yang diterapkan belum sepenuhnya dirasakan manfaatnya secara merata oleh seluruh petani di Desa Pararra. Hal ini tercermin dari pernyataan beberapa petani yang mengalami kendala dalam memperoleh pupuk. Dari sisi petani, akses terhadap pupuk bersubsidi masih menghadapi beberapa kendala, meskipun terdapat perbaikan. Beberapa petani seperti Saga, Amin Jaya, Asdin, dan Isman menyampaikan:

“Masih ada kendala ketersediaan dan distribusi, namun beberapa petani menilai akses sudah membaik.”³⁷

Pernyataan ini menunjukkan bahwa meskipun sebagian petani merasakan adanya peningkatan dalam aksesibilitas pupuk, namun masih terdapat kelompok petani lain yang menghadapi kendala dalam memperoleh pupuk tepat waktu dan sesuai kebutuhan. Kendala tersebut dapat berupa keterbatasan stok pupuk di tingkat pengecer, prosedur yang rumit, atau masalah distribusi yang belum merata.

³⁷ Amin Jaya, Asdin, dan Isman Petani, *Wawancara*, 12 April 2025

Oleh karena itu, perlu dilakukan evaluasi lebih lanjut terhadap efektivitas kebijakan yang diterapkan, serta mencari solusi untuk mengatasi kendala-kendala yang masih dihadapi oleh petani dalam mengakses pupuk bersubsidi di Desa Pararra. Dengan demikian, diharapkan kebijakan yang ada dapat memberikan dampak yang lebih signifikan dalam meningkatkan produktivitas pertanian dan kesejahteraan petani secara keseluruhan.

Kebijakan Kepala Desa Pararra dalam menangani kelangkaan pupuk bersubsidi menitikberatkan pada pengaktifan dan pembentukan kelompok tani, koordinasi dengan berbagai pihak, serta pengawasan distribusi. Kendala utama yang dihadapi adalah keterlambatan pengadaan dan distribusi pupuk serta keterbatasan ketersediaan pupuk bersubsidi. Kerjasama dengan pemerintah daerah, distributor, penyuluh, dan kelompok tani menjadi kunci dalam memperbaiki aksesibilitas pupuk bagi petani. Meskipun masih terdapat beberapa kendala, akses pupuk bagi petani mulai menunjukkan perbaikan yang signifikan melalui peran aktif kelompok tani sebagai jalur distribusi utama.

C. Pembahasan Hasil Penelitian

1. Kebijakan yang di terapkan oleh kepala desa dalam menangani kelangkaan pupuk di Desa Pararra

Kebijakan pemerintah desa dalam mengatasi kelangkaan pupuk di Desa Pararra merupakan respons strategis terhadap tantangan yang dihadapi oleh para petani, khususnya dalam hal ketersediaan dan aksesibilitas pupuk bersubsidi. Melalui penelitian yang dilakukan, dapat disimpulkan bahwa efektivitas kebijakan ini sangat dipengaruhi oleh beberapa faktor utama, yakni penguatan kelembagaan

kelompok tani, kolaborasi lintas sektor, sistem pengawasan, serta partisipasi aktif petani.

Langkah awal yang diambil oleh Kepala Desa Pararra adalah membentuk dan mengaktifkan kelompok tani sebagai ujung tombak dalam pendistribusian pupuk bersubsidi. Kebijakan ini dinilai sangat efektif karena kelompok tani tidak hanya berfungsi sebagai penerima manfaat, tetapi juga sebagai pengelola utama dalam proses pendataan, distribusi, hingga pengawasan penggunaan pupuk di tingkat petani. Melalui kelompok tani, pemerintah desa dapat melakukan pendataan anggota secara lebih sistematis sehingga distribusi pupuk dapat dilakukan secara lebih tepat sasaran dan transparan.

Selain itu, Kepala Desa juga menekankan pentingnya kolaborasi dengan berbagai pihak terkait, seperti pangkalan pupuk, pemerintah daerah, dan penyuluh pertanian. Kolaborasi ini bertujuan untuk memperlancar proses pengadaan dan distribusi pupuk bersubsidi, serta memastikan bahwa kebutuhan petani dapat terpenuhi secara berkelanjutan.

Pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan juga menjadi aspek penting dalam menjaga efektivitas program pupuk bersubsidi. Pemerintah desa, melalui ketua kelompok tani dan penyuluh pertanian, melakukan pengawasan baik pada saat distribusi maupun setelah masa panen. Pengawasan ini bertujuan untuk memastikan bahwa pupuk yang disalurkan benar-benar digunakan oleh petani sesuai dengan kebutuhan dan peruntukannya. Selain itu, pengawasan juga berfungsi sebagai sarana evaluasi untuk mengetahui kendala yang dihadapi petani

di lapangan. Dengan adanya pengawasan yang berjenjang, diharapkan penyimpangan dalam distribusi pupuk dapat diminimalisir.

Namun demikian, efektivitas kebijakan ini masih menghadapi beberapa kendala yang cukup signifikan. Salah satu kendala utama yang diungkapkan oleh responden adalah keterlambatan pengiriman pupuk dari pangkalan kecamatan dan keterbatasan akses pemerintah desa dengan pihak terkait yang belum massif.

Secara keseluruhan, efektivitas kebijakan pemerintah desa melalui program pupuk bersubsidi dalam mengatasi kelangkaan pupuk di Desa Pararra dapat dikatakan cukup baik. Kebijakan ini telah mampu meningkatkan koordinasi, memperkuat kelembagaan kelompok tani, dan memperbaiki sistem distribusi pupuk di tingkat desa. Namun, untuk mencapai efektivitas yang lebih optimal, masih diperlukan peningkatan dalam hal kerjasama lintas sektor, perbaikan sistem distribusi, serta advokasi untuk penambahan alokasi pupuk bersubsidi dari pemerintah pusat. Dengan demikian, diharapkan kebijakan ini dapat terus berkembang dan memberikan manfaat yang lebih besar bagi kesejahteraan petani dan peningkatan produktivitas pertanian di Desa Pararra

2. Kebijakan kepala Desa Pararra sudah efektif dalam menangani kelangkaan pupuk

Pelaksanaan program pupuk bersubsidi oleh pemerintah desa di Desa Pararra menitikberatkan pada penguatan kelembagaan kelompok tani, kolaborasi lintas sektor, serta pengawasan yang berlapis. Program ini dirancang sebagai respons terhadap kelangkaan pupuk yang selama ini menjadi kendala utama dalam meningkatkan produktivitas pertanian dan kesejahteraan petani. Dalam

implementasinya, pemerintah desa tidak hanya berfokus pada penyediaan pupuk, tetapi juga pada mekanisme distribusi yang transparan dan tepat sasaran.

a. Mekanisme Distribusi Pupuk Bersubsidi

Distribusi pupuk bersubsidi di Desa Pararra dilaksanakan melalui kelompok tani yang tersebar di lima dusun. Setiap kelompok tani terdiri dari sekitar 20 anggota, sehingga distribusi dapat dilakukan secara lebih terorganisir dan merata. Sistem ini memudahkan pendataan kebutuhan pupuk di masing-masing wilayah dan meminimalisir risiko ketidakmerataan distribusi. Setelah pupuk sampai di desa, proses distribusi di tingkat lokal berjalan dengan baik dan tepat sasaran. Hal ini menunjukkan bahwa tantangan utama dalam distribusi pupuk bersubsidi lebih banyak terjadi pada rantai pasokan dari pusat ke desa, sementara di tingkat desa sendiri, mekanisme distribusi sudah cukup efektif. Dalam dua tahun terakhir, telah terjadi perbaikan signifikan dalam sistem distribusi, baik dari aspek efisiensi logistik, koordinasi antar pihak, maupun transparansi penyaluran. Peran kelompok tani sebagai perantara sangat penting untuk mempermudah akses petani terhadap pupuk dan memastikan penyaluran yang tepat sasaran.

b. Peran Kelompok Tani dan Sosialisasi Program

Kelompok tani tidak hanya menjadi ujung tombak dalam distribusi pupuk bersubsidi, tetapi juga berperan aktif dalam melakukan sosialisasi program kepada anggotanya. Meskipun pemerintah desa belum secara aktif melaksanakan sosialisasi, kelompok tani mengambil inisiatif untuk menyampaikan informasi terkait program kepada para petani. Dalam pelaksanaannya, penyuluh pertanian juga berperan sebagai fasilitator utama

yang mengorganisir pertemuan dan memberikan penjelasan mengenai tata cara pengambilan, manfaat, serta prosedur program pupuk bersubsidi. Melalui pertemuan rutin dan komunikasi internal, kelompok tani menjadi media penyebaran informasi yang efektif. Dengan demikian, petani dapat memperoleh informasi secara langsung dan interaktif, yang pada akhirnya meningkatkan pemahaman dan partisipasi mereka dalam program pupuk bersubsidi.

c. Pengawasan Penyaluran Pupuk Bersubsidi

Pengawasan terhadap penyaluran pupuk bersubsidi menjadi aspek penting untuk memastikan bahwa pupuk benar-benar sampai kepada petani yang membutuhkan dan digunakan sesuai peruntukannya. Pemerintah desa melibatkan ketua kelompok tani dan penyuluh pertanian dalam proses pengawasan ini. Pengawasan dilakukan mulai dari pendataan kebutuhan, proses distribusi, hingga evaluasi setelah masa tanam. Sistem pengawasan tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga melibatkan interaksi langsung dengan petani untuk memastikan pupuk yang diterima telah digunakan secara tepat dan efektif. Dengan adanya pengawasan berlapis yang melibatkan berbagai pihak, distribusi pupuk dapat berjalan lebih transparan dan akuntabel, serta meminimalisir terjadinya penyimpangan.

d. Tantangan dan Perbaikan Pelaksanaan Program

Meskipun pelaksanaan program pupuk bersubsidi di Desa Pararra telah menunjukkan perbaikan, masih terdapat beberapa tantangan yang perlu diatasi, seperti pemerataan distribusi dan pendataan kebutuhan petani yang

belum sepenuhnya optimal. Distribusi pupuk memang sudah mulai membaik dalam dua tahun terakhir, namun masih ada petani yang merasa belum mendapatkan pupuk secara merata. Pemerintah desa terus berupaya memperbaiki sistem distribusi dengan mendorong petani yang belum tergabung dalam kelompok tani untuk segera mendaftar, serta memperkuat pengawalan proposal pengadaan pupuk ke pihak terkait. Upaya perbaikan ini diharapkan dapat memperluas cakupan penerima manfaat dan memastikan seluruh petani mendapatkan pupuk secara adil dan tepat waktu.

3. Faktor pendukung dan penghambat kepala Desa dalam menangani kelangkaan pupuk di Desa Pararra

a. Kebijakan Kepala Desa dalam Menangani Ketersediaan Pupuk

Kepala Desa Pararra menyadari bahwa ketersediaan pupuk bersubsidi sangat penting dalam meningkatkan produktivitas pertanian dan kesejahteraan petani di wilayahnya. Oleh karena itu, kebijakan yang diterapkan sangat strategis, dengan fokus pada penguatan kelompok tani. Pengaktifan kelompok tani sebagai garda depan dalam penyaluran pupuk bersubsidi bertujuan untuk memastikan bahwa pupuk dapat diakses oleh petani secara tepat waktu dan sesuai kebutuhan. Kebijakan ini melibatkan kolaborasi yang erat dengan berbagai pihak, termasuk pangkalan pupuk dan penyuluh pertanian. Hardi, salah satu aparat desa, menekankan pentingnya kolaborasi ini untuk mengatasi kelangkaan pupuk. Dengan adanya koordinasi yang baik, proses distribusi diharapkan dapat berjalan lebih lancar, sehingga petani tidak mengalami kesulitan dalam mendapatkan pupuk yang diperlukan. Selain itu, penguatan kelembagaan kelompok tani sebagai

pengelola distribusi juga berfungsi untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam proses penyaluran pupuk. Pendataan yang akurat terkait anggota kelompok tani dan kebutuhan pupuk mereka menjadi langkah penting dalam kebijakan ini. Dengan data yang tepat, alokasi pupuk dapat dilakukan dengan lebih efisien, menghindari kekurangan maupun pemborosan. Hal ini sejalan dengan prinsip pembangunan desa yang mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam setiap tahap pengambilan keputusan.

b. Kendala yang Dihadapi dalam Pelaksanaan Kebijakan

Meskipun kebijakan yang diterapkan menunjukkan kemajuan, pelaksanaannya tidak luput dari berbagai kendala. Salah satu masalah utama yang dihadapi adalah keterlambatan dalam distribusi pupuk dari tingkat kecamatan. Hal ini sering kali menyebabkan petani tidak mendapatkan pupuk tepat waktu, terutama menjelang musim tanam yang penting. Kendala ini berpotensi menghambat produktivitas pertanian dan menyebabkan kerugian bagi petani. Selain keterlambatan, terdapat juga masalah administratif yang menghambat proses pengadaan pupuk. Prosedur pengajuan yang rumit dan kurangnya komunikasi antara pemerintah desa dan pihak-pihak terkait, seperti distributor, dapat memperburuk situasi. Dedi, seorang ketua kelompok tani, menegaskan bahwa proses pengadaan sering kali sulit dan distribusi belum merata, menunjukkan bahwa meskipun upaya telah dilakukan, masih ada hambatan yang harus dipecahkan. Keterbatasan alokasi pupuk bersubsidi dari pusat juga menjadi tantangan yang signifikan. Jika pasokan dari pusat terbatas, maka akan berdampak pada semua sistem distribusi hingga ke tingkat petani. Oleh karena itu, diperlukan

advokasi yang kuat dan kerjasama yang lebih baik antara pemerintah desa dan pemerintah daerah untuk memastikan ketersediaan pupuk yang memadai.

c. Kerjasama dalam Mendukung Kebijakan Kepala Desa

Kerjasama merupakan faktor kunci dalam mendukung efektivitas kebijakan yang diterapkan oleh Kepala Desa. Kerjasama yang baik antara pemerintah desa, distributor, dan penyuluh pertanian dapat memperkuat rantai distribusi pupuk dan memastikan bahwa kebijakan berjalan dengan lancar. Saat ini, meskipun belum terjalin kerjasama langsung dengan distributor, koordinasi dengan pemerintah daerah telah dilakukan untuk mengatasi kelangkaan pupuk. Hardi menjelaskan bahwa hingga saat ini, pemerintah desa lebih banyak membangun koordinasi dengan pemerintah daerah, sementara hubungan formal dengan distributor masih terbatas. Untuk memperbaiki situasi ini, diperlukan upaya lebih lanjut untuk menjalin kemitraan langsung dengan distributor pupuk. Kerjasama yang sinergis akan memungkinkan distribusi pupuk menjadi lebih efisien dan aksesibilitas bagi petani semakin terjamin. Selain itu, peran penyuluh pertanian juga sangat penting dalam proses sosialisasi dan pengawasan distribusi pupuk. Penyuluh bertindak sebagai jembatan antara pemerintah dan petani, membantu menyampaikan informasi mengenai prosedur dan manfaat program pupuk bersubsidi. Dengan adanya kerjasama yang erat antara penyuluh, kelompok tani, dan pemerintah desa, diharapkan implementasi kebijakan dapat dilakukan secara lebih efektif dan tepat sasaran.

d. Aksesibilitas Pupuk bagi Petani

Aksesibilitas pupuk bersubsidi bagi petani di Desa Pararra masih menjadi isu yang kompleks, meskipun terdapat perbaikan dalam beberapa aspek. Dari sudut pandang petani, masih terdapat kendala dalam memperoleh pupuk sesuai kebutuhan. Beberapa petani, seperti Saga dan Asdin, menyatakan bahwa mereka mengalami kesulitan dalam mendapatkan pupuk tepat waktu, yang menunjukkan bahwa meskipun kebijakan telah memberikan dampak positif, tantangan dalam distribusi dan ketersediaan pupuk masih perlu diatasi. Kendala aksesibilitas ini dapat disebabkan oleh berbagai faktor, termasuk keterbatasan stok di tingkat pengecer dan prosedur pengambilan yang rumit. Untuk mengatasi masalah ini, pemerintah desa perlu melakukan evaluasi terhadap efektivitas kebijakan yang diterapkan dan mencari solusi untuk mempermudah akses petani terhadap pupuk. Upaya untuk mendorong petani yang belum tergabung dalam kelompok tani untuk mendaftar juga menjadi langkah penting dalam memperluas cakupan penerima manfaat dan meningkatkan keteraturan distribusi. Secara keseluruhan, meskipun kebijakan yang diterapkan oleh Kepala Desa Pararra dalam menangani kelangkaan pupuk bersubsidi menunjukkan kemajuan, masih ada tantangan yang perlu diatasi untuk memastikan aksesibilitas yang lebih baik bagi semua petani. Keterlibatan aktif semua pihak, baik pemerintah, kelompok tani, maupun distributor, akan menjadi kunci keberhasilan dalam meningkatkan kesejahteraan petani di Desa Pararra.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1 Kebijakan Kepala Desa dalam Menangani Kelangkaan Pupuk di Desa Pararra:

- a. Kepala Desa Pararra menerapkan kebijakan dengan mengaktifkan kelompok tani sebagai mitra distribusi pupuk bersubsidi.
- b. Koordinasi dengan pangkalan pupuk kecamatan dilakukan untuk memperlancar penyaluran.
- c. Pemerintah desa juga melibatkan penyuluh pertanian dalam proses pengawasan distribusi untuk menjamin ketepatan sasaran.
- d. Pendataan petani dan kebutuhan pupuk secara rutin dilakukan agar alokasi pupuk sesuai kebutuhan riil.

2. Efektivitas Kebijakan Kepala Desa dalam Menangani Kelangkaan Pupuk:

- a. Kebijakan telah menunjukkan efektivitas, terutama dalam memperbaiki sistem distribusi dan meningkatkan akses petani terhadap pupuk.
- b. Sistem distribusi melalui kelompok tani terbukti membantu distribusi yang lebih terorganisir dan tepat sasaran.

- c. Walaupun belum merata sepenuhnya, distribusi pupuk telah mengalami perbaikan signifikan dalam dua tahun terakhir.
- d. Sosialisasi belum optimal dari pemerintah desa, namun telah diambil alih oleh kelompok tani dan penyuluh pertanian dengan hasil yang cukup positif.

3. Faktor Pendukung dan Penghambat Kebijakan Kepala Desa:

1) Faktor Pendukung:

- a. Adanya kelompok tani yang aktif dan terorganisir.
- b. Dukungan penyuluh pertanian yang aktif mengawasi dan menyosialisasikan program.
- c. Respons positif dari petani, yang mulai merasa terbantu.

2) Faktor Penghambat:

- a. Distribusi pupuk dari pusat ke desa masih sering terlambat.
- b. Kurangnya sosialisasi resmi dari pemerintah desa.
- c. Masih ada petani yang belum tergabung dalam kelompok tani, sehingga tidak tercover dalam pendistribusian.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian mengenai efektivitas kebijakan kepala desa dalam menangani kelangkaan pupuk di Desa Pararra, berikut adalah beberapa saran yang dapat dipertimbangkan:

1. Peningkatan Sosialisasi

Pemerintah desa perlu meningkatkan sosialisasi tentang program pupuk bersubsidi kepada seluruh petani. Hal ini dapat dilakukan melalui

pertemuan rutin dengan kelompok tani dan penyuluh pertanian, agar setiap petani memahami mekanisme, manfaat, dan prosedur pengambilan pupuk bersubsidi secara jelas

2. Penguatan Data dan Pendataan

Penting bagi pemerintah desa untuk memperkuat sistem pendataan anggota kelompok tani dan kebutuhan pupuk. Dengan data yang akurat, alokasi pupuk dapat dilakukan secara lebih efisien dan tepat sasaran, sehingga menghindari kekurangan dan pemborosan

3. Kolaborasi Dengan Distributor

Diperlukan upaya untuk menjalin kerjasama yang lebih erat dengan distributor pupuk. Koordinasi yang baik antara pemerintah desa dan distributor akan memperlancar proses distribusi pupuk bersubsidi, sehingga ketersediaan pupuk di tingkat desa dapat lebih terjamin

4. Evaluasi Berkala

Melakukan evaluasi berkala terhadap program distribusi pupuk bersubsidi untuk mengidentifikasi kendala-kendala yang dihadapi. Hasil evaluasi ini akan berguna untuk perbaikan sistem distribusi dan pengawasan di masa depan

5. Peningkatan pengawasan

Pengawasan terhadap penggunaan pupuk perlu diperkuat dengan melibatkan lebih banyak pihak, termasuk ketua kelompok tani dan penyuluh pertanian. Dengan pengawasan yang lebih ketat, diharapkan penggunaan pupuk dapat lebih efektif dan sesuai dengan kebutuhan petani.

Dengan menerapkan saran-saran tersebut, diharapkan kebijakan yang ada dapat semakin efektif dalam mengatasi kelangkaan pupuk dan meningkatkan kesejahteraan petani di Desa Pararra.

DAFTAR PUSTAKA

- Ajina, Herminus, Natelda R Timisela, and Ester D Leatemia, ‘Dampak Kelangkaan Pupuk Bersubsidi Terhadap Produksi Dan Pendapatan Petani Padi Sawah Di Desa Waimital, Kecamatan Kairatu, Kabupaten Seram Bagian Barat’, *Jurnal Agrosilvopasture-Tech*, 2.2 (2023), 288– 96
<<https://doi.org/10.30598/j.agrosilvopasture-tech.2023.2.2.288>>
- Ari. S, “Pemberdayaan Masyarakat Melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) di Desa Pararra Kecamatan Sabbang Kabupaten Luwu Utara”. UIN Palopo. 2022
- Hardi, Dionisius Jusember, Tutut Dwi Sutiknjo, and Eko Yuliarsha Sidhi, ‘Efektivitas Fasilitasi Penyediaan Pupuk Bersubsidi Kabupaten Manggarai Timur Untuk Usahatani Padi Sawah’, *JINTAN : Jurnal Ilmiah Pertanian Nasional*, 3.1 (2023), 1–12
<<https://doi.org/10.30737/jintan.v3i1.3973>>
- Karini, May Dyah, ‘Produksi Beras Dalam Rangka Ketahanan Pangan’, *Jurnal Ketahanan Nasional*, 19.April (2013), 12–19
<<https://journal.ugm.ac.id/jkn/article/view/6765/5303>>
- Kautsar, M. Radinal, Sofyan, and T. Makmur, ‘Analisis Kelangkaan Pupuk Bersubsidi Dan Pengaruhnya Terhadap Produktivitas Padi (Oryza Sativa) Di Kecamatan Montasik Kabupaten Aceh Besar’, *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Pertanian*, 5.1 (2020), 97–107
- Kholis, Ikmal, and Khasan Setiaji, ‘Efektivitas Kebijakan Subsidi Pupuk Pada Petani Padi’, *Economic Education Analysis Journal*, 9.2 (2020), 503–15
<<https://doi.org/10.15294/eeaj.v9i2.39543>>
- Kusnadi, Iwan Henri, Natika Luki, and Firdaus Faqihudin, ‘Efektivitas Penyelenggaraan Program Pelatihan Kerja Di UPTD Balai Latihan Kerja Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Kabupaten Subang’, *The World of Public Administration Journal*, 3.2 (2022), 106–23
<<https://doi.org/10.37950/wpaj.v3i2.1228>>
- Mansur, Jumria, ‘Implementasi Konsep Pelaksanaan Kebijakan Dalam Publik’, *Pharmacognosy Magazine*, 75.17 (2021), 399–405
- Maulia, Tria, Rifki Fathurrahman, Putri Cindy Claudia, Tumiar Sidauruk, and M Taufik Rahmadi, ‘Analisis Kelangkaan Pupuk Bersubsidi Untuk Petani Padi (Studi Kasus Dusun VIII Desa Pematang Setrak Kecamatan

Teluk Mengkudu)', *JoulLaGe: Journal of Laguna Geography*, 2.1 (2023), 18

Sulandjari, Kuswarini, and Dewa Oka Suparwata, 'Inovasi Dalam Pertanian Berkelanjutan Di Kabupaten Sukabumi: Dari Pertanian Vertikal Hingga Bioinformatika Pertanian Mewujudkan Sumber Pangan Yang Lebih Berkelanjutan', *Jurnal Multidisiplin West Science*, 2.09 (2023), 780–89
<<https://doi.org/10.58812/jmws.v2i09.667>>

Wahyu Priandanata, Danni Andreas, and Adam Jamal, 'Efektivitas Implementasi Kebijakan Pengambilan Keputusan Kebijakan Subsidi Pupuk Di Desa Tumpakpelem Kecamatan Sawoo Kabupaten Ponorogo', *Eksekusi : Jurnal Ilmu Hukum Dan Administrasi Negara*, 2.2 (2024), 305–22
<<https://doi.org/10.55606/eksekusi.v2i2.112>>

PEDOMAN WAWANCARA

PETANI

1. Sejak kapan Anda mulai mengalami kesulitan dalam mendapatkan pupuk bersubsidi?
2. Bagaimana proses Anda memperoleh pupuk bersubsidi selama ini?
3. Apakah ada perubahan dalam distribusi pupuk bersubsidi dalam beberapa tahun terakhir? Jika ya, bagaimana perubahannya?
4. Apakah jumlah pupuk yang Anda terima sesuai dengan kebutuhan pertanian Anda? Jika tidak, bagaimana cara Anda mengatasinya?
5. Apakah ada kendala yang sering Anda hadapi dalam mendapatkan pupuk bersubsidi? (Misalnya keterlambatan, harga lebih tinggi, atau tidak tersedia di pasaran)
6. Bagaimana kebijakan kepala desa dalam menangani kelangkaan pupuk ini?
7. Apakah menurut Anda kebijakan yang diterapkan sudah efektif? Jika ya/tidak, mengapa?
8. Apakah Anda pernah menyampaikan keluhan atau masukan terkait pupuk bersubsidi kepada pihak desa? Bagaimana respons mereka?
9. Apa harapan Anda terhadap pemerintah desa dalam mengatasi kelangkaan pupuk bersubsidi di masa depan?

APARAT DESA

1. Bagaimana mekanisme distribusi pupuk bersubsidi di Desa Pararra?
2. Apa saja kebijakan yang telah diterapkan oleh pemerintah desa untuk mengatasi kelangkaan pupuk?
3. Apa kendala utama yang dihadapi dalam implementasi kebijakan tersebut?
4. Bagaimana strategi kepala desa dalam memastikan pupuk bersubsidi sampai kepada petani yang membutuhkan?
5. Apakah ada sosialisasi yang dilakukan kepada petani mengenai kebijakan distribusi pupuk? Jika ya, bagaimana pelaksanaannya?
6. Apakah ada langkah-langkah pengawasan untuk memastikan distribusi pupuk berjalan dengan baik dan tepat sasaran?
7. Bagaimana peran penyuluh pertanian dalam mendukung kebijakan ini?
8. Apakah ada kerja sama dengan pihak lain (misalnya distributor, pemerintah daerah) dalam menangani kelangkaan pupuk?
9. Bagaimana tanggapan petani terhadap kebijakan yang telah diterapkan? Apakah mereka merasa terbantu atau masih mengalami kesulitan?
10. Apa rencana atau strategi ke depan yang akan dilakukan untuk meningkatkan efektivitas kebijakan dalam menangani kelangkaan pupuk?

L

A

M

P

I

R

A

N

1. Wawancara dengan Bapak Hardi selaku Kaur Keuangan, Desa Pararra Kecamatan Sabbang Kabupaten Luwu Utara.



2. Wawancara dengan Bapak Suprianto selaku Kasi Pelayanan, Desa Pararra Kecamatan Sabbang Kabupaten Luwu Utara.



3. Wawancara dengan Bapak Dedi selaku Kepala Dusun Sangkale, Desa Pararra Kecamatan Sabbang Kabupaten Luwu Utara



4. Wawancara dengan Bapak Saga selaku Ketua Kelompok Tani, Dusun Sangkale, Desa Pararra Kecamatan Sabbang Kabupaten Luwu Utara



5. Wawancara dengan Bapak Amin Jaya selaku Petani, Dusun Sangkale, Desa Pararra Kecamatan Sabbang Kabupaten Luwu Utara



6. Wawancara dengan Bapak Asdin selaku Petani, Dusun Sangkale, Desa Pararra Kecamatan Sabbang Kabupaten Luwu Utara



7. Wawancara dengan Bapak Amin Jaya selaku Petani, Dusun Sangkale, Desa Pararra Kecamatan Sabbang Kabupaten Luwu Utara

RIWAYAT HIDUP



Ade, Lahir di Desa Parrara, Kecamatan Sabbang, Kabupaten Luwu Utara, pada Tanggal 23 Mei 2001. Penulis merupakan anak ke 1 dari 5 bersaudara dari pasangan seorang Ayah bernama Masdin dan Ibu wisra. Saat ini penulis bertempat tinggal di Desa Parrara, Kecamatan Sabbang Kabupaten Luwu Utara.

Pendidikan dasar penulis di selesaikan pada tahun 2013 di SDN 022 Desa Pararra, kemudian di tahun yang sama menempuh pendidikan di SMPN 3 Sabbang hingga tahun 2016, pada tahun yang sama melanjutkan melanjutkan pendidikan di SMAN 5 Luwu Utara setelah Lulus di SMAN 5 Luwu utara penulis melanjutkan pendidikan di bidang yang di tekuni yaitu Prodi Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Palopo.